

**DAMPAK INVESTASI SEKTOR PERKEBUNAN KELAPA
SAWIT DARI PT. BIO NUSANTARA TEKNOLOGI TERHADAP
PELESTARIAN LINGKUNGAN DI PROVINSI BENGKULU**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Hukum
Universitas Bengkulu**

Di Susun Oleh

GUSTI NURHASANAH

B1A009032

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BENGKULU
2014**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “Dampak Investasi Sektor Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bio Nusantara Teknologi Terhadap Pelestarian Lingkungan Di Provinsi Bengkulu” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

Penyusunan skripsi ini terselesaikan berkat do’a, bantuan, dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak M. Abdi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
2. Bapak Edityawarman, S.H., M.Hum selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
3. Bapak Dr. Tito Sofyan, S.H., M.S selaku dosen pembimbing utama dan Ibu Dr. Nur Sulistyo B. Ambarini, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing pendamping yang telah memberikan arahan selama bimbingan.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat.
5. Pihak PT. Bio Nusantara Teknologi, pihak Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Bengkulu, pihak Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu, pihak

Dinas Perkebunan, pihak Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) dan para responden yang telah memberikan bantuan dan informasi.

6. Orang tua beserta kedua ayuk saya yang telah memberikan untaian do'a, curahan kasih sayang, dan motivasi yang tiada henti.
8. Sahabat-sahabat atas bantuan dan motivasinya, semoga
9. Teman-teman Fakultas Hukum atas kebersamaan dan kerjasamanya selama ini.
10. Seluruh karyawan dan staf Fakultas Hukum atas bantuan yang diberikan.
11. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, kritik dan saran penulis harapkan untuk menjadikannya lebih baik. Akhirnya semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya.

Bengkulu, Desember 2013

Penulis

Gusti Nurhasanah

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Motto dan Persembahan	iv
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	ix
Daftar Lampiran	x
Abstrak	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Penelitian.....	13
E. Tinjauan Pustaka	
1. Investasi Sektor Perkebunan Kelapa Sawit	
a. Perkebunan Kelapa Sawit	13
b. Investasi Sektor Perkebunan Kelapa Sawit	16
2. Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup	
a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan	19
b. Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Investasi dan Pelestarian Lingkungan	27
F. Metode Penelitian	
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	31
2. Lokasi Penelitian	31
3. Penentuan Informan	32
4. Sumber Data	
a. Sumber data primer	32
b. Sumber data sekunder	32
5. Teknik Pengumpulan Data	
a. Pengamatan	33
b. Wawancara	33
6. Pengolahan Data dan Analisis Data	33

BAB II GAMBARAN UMUM

A. Perkebunan Kelapa Sawit Di Provinsi Bengkulu	36
B. PT. Bio Nusantara Teknologi	
a. Sejarah dan Struktur Organisasi PT. Bio Nusantara Teknologi	38
b. Investasi di PT. Bio Nusantara Teknologi	42

c. Tanggung Jawab PT. Bio Nusantara Teknologi Terhadap Lingkungan	44
--	----

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pelaksanaan AMDAL Di PT. Bio Nusantara Teknologi	
1 Kriteria Kegiatan Wajib AMDAL	49
2 Prosedur AMDAL.....	54
3 Pelaksanaan Dokumen Lingkungan Hidup Di PT. Bio Nusantara Teknologi.	61
B. Dampak Sosial Adanya PT. Bio Nusantara Teknologi	73

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran-saran	78

DAFTAR PUSTAKA	79
-----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Wilayah Potensi Pengembangan Komoditi Kelapa Sawit	36
Tabel 1.2 Beberapa Perkebunan Kelapa Sawit Di Provinsi Bengkulu	36
Tabel 1.3 Luas Lahan PT. Bio Nusantara Teknologi	39
Tabel 1.4 Jenis Kegiatan Berdampak Penting	53
Tabel 1.5 Hasil Uji Air Limbah PT. Bio Nusantara Teknologi	71
Tabel 1.6 Hasil Uji Kualitas Air Sungai Lemau	71

DAFTAR LAMPIRAN

Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup PT. Bio Nusantara Teknologi
Kronologis Konflik Sengketa Lahan Di Wilayah Sungai Limau Akibat HGU
Perkebunan PT. Bio Nusantara Teknologi
Dokumentasi Kegiatan CSR PT. Bio Nusantara Teknologi
Surat Izin Penelitian
Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Kelapa sawit merupakan komoditas tanaman perkebunan yang potensial mengisi peluang pasar baik domestik maupun internasional. Prospek tersebut mendorong para investor untuk membuka perkebunan kelapa sawit di Provinsi Bengkulu. Investasi perkebunan kelapa sawit yang ada di Provinsi Bengkulu memberikan pengaruh positif dan negatif bagi lingkungan, baik lingkungan hidup maupun lingkungan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan Amdal dan dampak sosial dari PT. Bio Nusantara Teknologi. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan wawancara langsung kepada responden. Data yang diperoleh, dianalisa secara deskriptif dengan menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Bio Nusantara Teknologi memiliki dokumen UKL-UP. Seiring waktu PT. Bio Nusantara Teknologi memperluas lahan perkebunan sehingga perusahaan harus membuat dokumen Amdal. Namun, PT. Bio Nusantara Teknologi tidak memiliki Amdal, melainkan memiliki Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup karena PT. Bio Nusantara Teknologi sebelumnya telah memiliki izin usaha dan telah memiliki dokumen UKL-UPL. Dalam pelaksanaan kegiatan perkebunan dan pengelolaan pabrik kelapa sawit, PT. Bio Nusantara Teknologi belum sesuai dengan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup tersebut, sehingga timbulnya dampak negatif bagi lingkungan hidup dan lingkungan sosial, salah satunya masyarakat sekitar kehilangan mata pencaharian sehingga masyarakat melakukan aksi demo dan pemberontakan.

Kata kunci : *Perkebunan kelapa sawit, investasi, dampak, lingkungan hidup dan lingkungan sosial*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.¹ Pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berlanjut untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju.

Pembangunan nasional adalah pembangunan dari, oleh dan untuk rakyat dilaksanakan semua aspek kehidupan bangsa yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial-budaya dan aspek pertahanan keamanan dengan senantiasa harus merupakan perwujudan Wawasan Nusantara serta memperkuat Ketahanan Nasional yang diselenggarakan dengan sasaran jangka panjang yang ingin diwujudkan.

¹ Tom Gunadi, 1981, *Sistem Perekonomian Menurut Pancasila dan Undang-Undnag Dasar 1945*, CV. Angkasa, Bandung, hlm 4.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak pulau yang tersebar. Dengan banyaknya pulau-pulau yang di kelilingi lautan, menjadikan Indonesia kaya akan sumber daya alam (SDA) laut. Dimana hasil laut yang melimpah seperti, banyaknya ikan, terumbu karang, dan lain sebagainya. Selain itu, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang dilewati garis khatulistiwa, sehingga memberikan keuntungan bagi Indonesia tanah yang subur. Namun, pada kenyataannya sumber daya alam (SDA) tersebut masih banyak yang belum dikelola secara maksimal dan mensejahterahkan masyarakat dengan adil dan makmur. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3), menyebutkan bahwa :

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar - besarnya kemakmuran rakyat”

Dari bunyi pasal di atas, memakmurkan rakyat merupakan salah satu tujuan dari pembangunan nasional negara Indonesia.

Salah satu aspek pembangunan nasional yang memberikan dampak besar bagi Indonesia adalah pembangunan nasional melalui aspek ekonomi. Ruang lingkup aspek ekonomi ini sangatlah luas, sehingga mempengaruhi pembangunan nasional di Indonesia. Dalam aspek ekonomi ini mencakup seluruh kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perekonomian di Indonesia seperti, perdagangan, investasi, perbankan, dan lain sebagainya. Pembangunan ekonomi haruslah mengarah kepada sistem ekonomi nasional berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma hukum tertinggi negara Republik Indonesia yang disusun untuk mewujudkan

demokrasi ekonomi yang dijadikan sebagai dasar pelaksanaan pembangunan.² Tercantum didalam Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa :

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Pembangunan ekonomi tidak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), karena pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi.³ Semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di suatu negara, melahirkan suatu hukum ekonomi yang dimana berfungsi mengatur dan membatasi kegiatan-kegiatan ekonomi dengan harapan pembangunan perekonomian tidak mengabaikan hak-hak dan kepentingan masyarakat.⁴

Tumbuhnya hukum ekonomi ini berpangkal pada konsepsi negara kesejahteraan, yang mewajibkan negara secara aktif menyelenggarakan kepentingan

² Rachmadi Usman, 2000, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Djambatan, Jakarta, hlm 4.

³ http://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_ekonomi pada tanggal 25 Maret 2013 pukul 12.26 WIB

⁴ Sunaryati Hartono, 1982, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, BinaCipta, Bandung hlm 7.

umum dan tidak hanya menyerahkan kepada warga negara sendiri saja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan saja.⁵ Pemerintah berkewajiban untuk melindungi hak-hak dan kepentingan masyarakat dalam bentuk aturan-aturan hukum sebagai sarana untuk merealisasikan kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan ekonomi yang akan meningkatkan taraf hidup dan kecerdasan bangsa Indonesia sebagai negara kesejahteraan.

Pembangunan nasional yang mewujudkan kehidupan yang adil dan makmur bagi rakyat memerlukan langkah-langkah pembaharuan di berbagai bidang, apalagi Indonesia sekarang ini telah memasuki dekade pembangunan dan berada pada posisi transisional untuk menuju negara yang maju, aman, adil dan sejahtera. Kesemua langkah tersebut memerlukan kesiapan sumber daya manusia (SDM) untuk dapat mengantisipasi setiap perkembangan dan perubahan yang terjadi. Salah satu kebijakan pemerintah yaitu pengembangan penanaman modal guna menopang pertumbuhan ekonomi dan memacu gerak pembangunan nasional.⁶

Kebijakan pemerintah lainnya yaitu mengatur bidang usaha bagi penanam modal. Kebijakan bidang usaha bagi penanam modal di anggap sangat penting, karena dengan kebijakan per bidang usaha dan pengembangannya diharapkan kepastian berusaha bagi penanam modal. Hal ini sesuai dengan pembangunan nasional yang dinyatakan dalam PROPENAS yaitu peningkatan penanaman modal untuk membantu kelancaran pembangunan ekonomi nasional dengan

⁵ Rachmadi Usman, op cit, hlm 21.

⁶ Sunaryati Hartono, op cit, hlm 10.

mengikutsertakan partisipasi masyarakat dan menciptakan iklim penanaman modal guna peningkatan penanaman modal baik asing maupun dalam negeri.⁷

Sektor pertanian merupakan sektor ekonomi yang sangat penting peranannya dalam perekonomian nasional. Penanaman modal di bidang usaha pertanian meliputi penanaman modal subbidang tanaman pangan (pembenihan dan pembibitan sayuran, padi jagung, dan lain-lain), subbidang peternakan (peternakan ayam petelur, pembibitan aneka ternak, peternakan sapi perah, dan lain sebagainya), subbidang perikanan (pembudidayaan ikan), subbidang perkebunan (kelapa sawit, karet, kopi coklat dan lain-lain), dan subbidang kehutanan (pengusahaan rotan, pengusahaan dammar, dan lain-lain).

Penanaman modal khususnya dalam subbidang usaha perkebunan dapat diarahkan untuk meningkatkan ekspor dan memenuhi kebutuhan industri dalam negeri melalui peremajaan, rehabilitasi, perbaikan mutu tanaman, penganekaragaman jenis dan pemanfaatan lahan transmigrasi perkebunan, lahan kering dan rawa yang ditangani secara lebih intensif dalam sistem agrobisnis yang terpadu dengan agroindustri melalui keterkaitan yang saling menguntungkan antara petani produsen dengan industri yang didukung oleh pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penyuluhan maupun penyediaan sarana dan prasarana yang tersedia.⁸

Lahan perkebunan adalah lahan usaha pertanian yang luas, biasanya terletak di daerah tropis atau subtropis, yang digunakan untuk menghasilkan komoditi

⁷ Aminuddin Ilmar, 2004, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, hlm 89.

⁸ *Ibid.* hlm 98.

perdagangan (pertanian) dalam skala besar dan dipasarkan ke tempat yang jauh, bukan untuk konsumsi lokal.⁹ Aplikasi penanaman modal melalui perkebunan meliputi usaha perkebunan karet, kelapa sawit, cokelat, kopi, teh, kapas, dan sebagainya.

Indonesia salah satu negara penghasil kelapa sawit yang merupakan komoditas perkebunan yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Produknya tidak hanya untuk menyuplai kebutuhan sejumlah industri di dalam negeri, tetapi juga permintaan pasar ekspor. Oleh karenanya, peluang perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahan kelapa sawit masih sangat diminati, baik untuk memenuhi pasar dalam dan luar negeri. Bagi investor, kondisi ini menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Bahkan dalam kondisi krisis ekonomi sekali pun, terbukti mampu *survive* dan tetap tumbuh.¹⁰

Memiliki potensi sumber daya alam yang besar memberikan keuntungan besar bagi Indonesia. Namun, sumber daya alam yang belum terkelola secara maksimal dan memadai bukanlah sebuah perkara mudah untuk dilakukan. Pengelolaan potensi ekonomi menjadi ekonomi riil berupa barang dan jasa memerlukan modal yang besar, teknologi, keterampilan (*skill*) dan manajemen yang baik.¹¹ Dalam kegiatan pengelolaan potensi ekonomi menjadi ekonomi riil, modal dapat disediakan oleh pemerintah dan oleh masyarakat luas, khususnya dunia usaha

⁹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Perkebunan> pada tanggal 18 Maret pukul 13.59 WIB

¹⁰ Maruli Pardamean, *Sukses Membuka Kebun Dan Pabrik Kelapa Sawit*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm 4.

¹¹ Aminuddin Ilmar, op cit, hlm 192.

swasta. Keadaan yang ideal, dari segi nasionalisme adalah apabila kebutuhan akan modal tersebut sepenuhnya dapat disediakan oleh kemampuan modal dalam negeri sendiri, baik oleh pemerintah dan/atau dunia usaha swasta dalam negeri.¹²

Umumnya negara-negara berkembang dalam hal ketersediaan modal yang cukup untuk melaksanakan pembangunan secara menyeluruh mengalami berbagai kesulitan. Pemerintah melakukan berbagai kebijakan dan pendekatan kepada negara-negara yang dapat memberikan bantuan modal yakni, dengan menggalakkan penanaman modal. Penanaman modal dilaksanakan secara langsung (*direct investment*) dan penanaman modal secara tidak langsung (*portofolio investment*) dimana pemilik modal hanya memiliki sejumlah saham dalam suatu perusahaan tanpa ikut serta atau mempunyai kekuasaan langsung dalam pengelolaan manajemen perusahaan tersebut.¹³

Semakin terbukanya dunia usaha di Indonesia, masuknya investasi dari kalangan investor dalam negeri maupun investor asing, memberikan dampak yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Investasi merupakan suatu penggunaan proses penguatan perekonomian negara. Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang.¹⁴ Investasi berdasarkan jenisnya terbagi menjadi dua, yaitu : investasi langsung (*direct investment*) seperti mendirikan pabrik,

¹² *Ibid*, hlm 2.

¹³ Eduardus Tandelilin, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, Djambatan, Jakarta, hlm 5.

¹⁴ *Ibid*, hlm 3.

mendirikan perusahaan, mendirikan toko, membeli tanah, dan lain-lain. Investasi secara tidak langsung (*indirect investment*) seperti membeli saham, obligasi, menanam uang pada deposito di Bank dan sebagainya.

Investasi secara langsung, banyak dilakukan melalui perusahaan atau perseroan terbatas (PT). Hal ini sebagaimana di tetapkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang berbunyi :

”(1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

“(2) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.”

Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.¹⁵ Pada Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, berbunyi :

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

¹⁵ http://id.wikipedia.org/wiki/Perseroan_terbatas.htm pada tanggal 25 Maret pukul 14.59

Sebagian besar penanaman modal atau investasi di Provinsi Bengkulu secara langsung melalui perusahaan atau perseroan terbatas (PT) ada dalam bentuk perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit.

Perusahaan - perusahaan atau perseroan terbatas (PT) dalam bidang perkebunan khususnya perkebunan kelapa sawit memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap lingkungan. Dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktivitas yang dapat bersifat alamiah, baik kimia, fisik maupun biologi.¹⁶ Adanya perusahaan perkebunan kelapa sawit, berarti menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, sehingga masyarakat mendapatkan penghasilan untuk hidup yang lebih baik. Selain itu, perusahaan perkebunan kelapa sawit juga memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena setiap penggunaan sumber daya dalam pembangunan selalu disertai dengan terjadinya kerusakan lingkungan. Kerusakan-kerusakan yang terjadi tersebut meliputi kerusakan air, tanah, dan udara. Pasal 1 butir 17 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup di katakan :

“Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”

Dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia khususnya di Provinsi Bengkulu, haruslah berdasarkan pada asas-asas sehingga dapat terlaksana dengan baik dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Asas-asas tersebut

¹⁶ Otto Soemarwoto, *Analisis Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm 43.

sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan yang berbunyi :

“Perkebunan diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan”

Selain memperhatikan asas-asas tersebut, para penanaman modal bertanggung jawab atas kelestarian lingkungan hidup sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 16 huruf d Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang berbunyi :

“Setiap penanam modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi :

“Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.”

Menjaga kemampuan lingkungan untuk mendukung pembangunan merupakan usaha untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

Terwujudnya pembangunan berkelanjutan haruslah berwawasan lingkungan dengan menggunakan sumber daya secara bijaksana.¹⁷

Perkembangan dunia perekonomian khususnya dalam pengembangan penanaman modal di Indonesia merupakan salah satu strategi dalam pencapaian pembangunan nasional. Investasi dalam sektor perkebunan merupakan salah satu investasi terbesar yang diminati oleh para investor, khususnya di Provinsi Bengkulu. Banyaknya lahan yang belum dikelola memberikan peluang investasi bagi para investor, baik investor asing maupun investor dalam negeri.

Di Provinsi Bengkulu, investasi dalam sektor perkebunan khususnya perkebunan kelapa sawit cukup diminati dengan tersebarnya perkebunan kelapa sawit di berbagai wilayah di Provinsi Bengkulu. Perkebunan kelapa sawit tersebut diusahakan oleh perusahaan perkebunan atau perseroan. Keberadaan perkebunan kelapa sawit yang dikelola dengan dengan tepat, memberikan dampak positif pada perekonomian masyarakat sekitar dan daerah, yaitu dengan terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar serta mempertahankan keseimbangan alam. Namun, perkebunan kelapa sawit yang tidak dikelola dengan tepat, memberikan dampak negatif bagi lingkungan yang meliputi air, tanah, udara dan lingkungan sosial masyarakat sekitar. PT. Bio Nusantara Teknologi merupakan salah satu perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengelolaan kelapa sawit yang ada di Provinsi Bengkulu, namun pengelolaan limbah hasil kelapa sawit masih belum memenuhi ketentuan-

¹⁷ *Ibid*, hlm 31.

ketentuan yang berlaku, sehingga terjadinya dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan sosial yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. Oleh karena itu, dilakukannya penelitian terhadap **“Dampak Investasi Dalam Sektor Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Pelestarian Lingkungan Di Provinsi Bengkulu”** agar para pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat memberikan kebijakan yang bijaksana kepada para investor, sehingga para investor dapat memperhatikan dampak-dampak yang akan terjadi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa pelaksanaan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) PT. Bio Nusantara Teknologi sudah sesuai dengan peraturan tentang Amdal ?
2. Apa dampak sosial adanya perkebunan kelapa sawit PT. Bio Nusantara Teknologi terhadap pelestarian lingkungan ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan Amdal PT. Bio Nusantara Teknologi sudah sesuai dengan peraturan tentang Amdal atau belum sesuai.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa dampak sosial adanya perkebunan kelapa sawit PT. Bio Nusantara Teknologi terhadap pelestarian lingkungan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan masukan kepada pihak-pihak yang terkait :

a. Kegunaan Teoritis

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu hukum perdata ekonomi.
2. Sebagai bahan referensi bagi studi ilmu hukum umumnya dan investasi sektor perkebunan kelapa sawit khususnya.

b. Kegunaan Praktis

1. Sebagai bahan bacaan dan sumber informan bagi masyarakat mengenai dampak investasi sektor perkebunan kelapa sawit terhadap pelestarian lingkungan.
2. Sebagai gambaran dan bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengatasi kendala-kendala dalam pengaturan lebih lanjut tentang investasi sektor perkebunan kelapa sawit di Provinsi Bengkulu.

E. TINJAUAN PUSTAKA

1. Investasi Sektor Perkebunan Kelapa Sawit

a. Perkebunan Kelapa Sawit

Indonesia merupakan negara agraris yang kaya akan tanaman pangan. Selain itu, Indonesia juga kaya akan tanaman industri dan hortikultura. Tanaman tersebut merupakan salah satu kekayaan alam yang tak ternilai yang bermanfaat untuk

konsumsi dalam maupun luar negeri.¹⁸ Usaha perkebunan adalah kegiatan-kegiatan yang meliputi penanaman, pengelolaan, dan pemasaran hasil yang dapat merupakan usaha terpadu (*integrated agribisnis*) dan mendorong pengembangan usaha agribisnis sekunder dan industri yang membantu pengembangan usaha perkebunan.¹⁹ Didalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, menyebutkan :

“Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/ atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.”

Yang dimaksud dengan tanaman tertentu menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan adalah :

“Tanaman tertentu adalah tanaman semusim dan/atau tanaman tahunan yang karena jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan sebagai tanaman perkebunan.”

Tanaman semusim adalah tanaman yang hanya mampu tumbuh selama semusim pada tahun tersebut, atau tanaman tahunan yang biasa dipanen cepat sebelum musim berakhir. Jenis tanaman perkebunan semusim tidaklah sebanyak tanaman perkebunan tahunan. Tanaman tahunan adalah tanaman yang mampu tumbuh lebih dari dua tahun. Tanaman yang ditanam dalam perkebunan bukanlah tanaman yang menjadi makanan pokok maupun sayuran, melainkan tanaman yang

¹⁸ <http://informasidankita.blogspot.com/2008/08/jenis-tanaman-industri.html> pada tanggal 7 Oktober 2013 pukul 19.00 WIB Posted by Elisa Rinice

¹⁹ Aminuddin Ilmar, 2004, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, hlm 98.

ditanam berukuran besar dengan waktu penanaman yang relatif lama, antara kurang dari setahun hingga tahunan.

Tanaman industri adalah komoditas untuk memajukan perekonomian negara serta sebagai penghasil devisa dengan mengekspornya ke negara lainnya. Tanaman industri tahunan umumnya mengacu pada tanaman berkayu keras yang membedakannya dengan semak dan rerumputan di sekitarnya. Tanaman industri tahunan mampu dipanen beberapa kali sebelum akhirnya mengalami penurunan hasil dan tidak lagi produktif secara ekonomi yang kemudian akan ditebang. Beberapa jenis komoditi pertanian yang biasa diusahakan dalam perkebunan, kelapa sawit termasuk dalam jenis tanaman industri tahunan.²⁰ Kelapa sawit adalah tanaman perkebunan penting penghasil minyak makanan, minyak industri, maupun bahan bakar nabati (*biodiesel*).

Dalam pembukaan lahan perkebunan, pelaku usaha haruslah memiliki izin perkebunan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perkebunan, yang berbunyi :

“Setiap pelaku usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengelolaan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin usaha perkebunan”

Sehingga, apabila pelaku usaha tidak memiliki izin usaha perkebunan maka, pelaku usaha tidak dapat membuka lahan perkebunan.

Ukuran luas perkebunan sangat relatif dan tergantung ukuran volume komoditi yang dipasarkannya. Namun demikian, suatu perkebunan memerlukan suatu

²⁰ <http://id.wikipedia.org/wiki/Perkebunan> pada tanggal 7 Oktober 2013 pukul 19.30 WIB

luas minimum untuk menjaga keuntungan melalui sistem produksi yang diterapkannya. Selain itu, perkebunan harus selalu menerapkan cara monokultur dan terdapat instalasi pengolahan atau pengemasan terhadap komoditi yang dipanen di lahan perkebunan itu, sebelum produknya dikirim ke pembeli.

b. Investasi Sektor Perkebunan Kelapa Sawit

Istilah investasi yang dikenal juga dengan penanaman modal dapat berkaitan dengan berbagai macam aktivitas. Menurut Dr. Eduardus, investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang.²¹ Dengan demikian para investor menahan keinginan untuk sekarang namun memperoleh keuntungan di kemudian hari. Investasi menurut Dr. Jogiyanto, yaitu penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan didalam produksi efisien selama periode waktu tertentu.²² Produksi efisien yang dimaksud adalah kelapa sawit yang merupakan salah satu jenis tanaman perkebunan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi, sehingga memberikan keuntungan bagi para investor.

Menurut McGraw Hill, *an investment is the current commitment of money or other resources in the expectation of reaping future benefits*²³, yang artinya investasi adalah suatu komitmen terkini terkait dengan uang atau sumber daya lainnya dengan harapan mendapat keuntungan di masa yang akan datang. Pengertian investasi atau

²¹ Eduardus Tandelilin, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, Djambatan, Jakarta, hlm 3.

²² Jogiyanto, *Teori Portofolio dan Investasi* (edisi 3), BPFE, Yogyakarta, hlm 5.

²³ McGraw Hill Companies Irwin, *Essentials of Investment*, Companies Irwin, Jakarta, hlm 3.

penanaman modal ini juga diperjelas dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang berbunyi :

“Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.”

Dalam kegiatan ekonomi, investasi dapat berupa investasi langsung dan investasi tidak langsung.²⁴

1. Investasi Langsung

. Investasi langsung merupakan kegiatan membeli langsung aktiva keuangan dari suatu perusahaan baik melalui perantara atau dengan cara yang lain. Investasi langsung dapat dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang dapat diperjualbelikan di pasar uang (*money market*), pasar modal (*capital market*), atau pasar turunan (*derivative market*).

2. Investasi Tidak Langsung

Investasi tidak langsung dilakukan dengan membeli saham dari perusahaan investasi yang mempunyai portofolio aktiva-aktiva keuangan dari perusahaan-perusahaan lain. Investasi tidak langsung dilakukan dengan membeli surat-surat berharga dari perusahaan investasi. Perusahaan investasi adalah perusahaan yang menyediakan jasa keuangan dengan cara menjual sahamnya ke publik dan menggunakan dana yang diperoleh untuk diinvestasikan ke dalam portofolionya.

Dalam buku investasi lainnya, investasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut:²⁵

²⁴ Jogyanto, op cit, hlm 7.

1. Investasi dalam bentuk aset riil (*real assets*), yaitu investasi dalam bentuk aktiva berwujud fisik, seperti emas, batu mulia, pembukaan pertambangan, pembukaan perkebunan dan sebagainya.
2. Investasi dalam bentuk surat berharga/sekuritas (*marketable securities financial assets*), yaitu investasi dalam bentuk surat-surat berharga yang pada dasarnya merupakan klaim atas aktiva riil yang diawasi oleh suatu lembaga/perorangan tertentu, seperti obligasi, saham, warrant dan sebagainya.

Dalam penelitian ini, jenis investasi yang digunakan adalah investasi dalam bentuk aset riil (investasi langsung) yaitu menempatkan uang secara langsung pada perusahaan, proyek, atau bisnis dengan harapan bisa memperoleh tingkat imbal hasil yang menarik.²⁶ Bentuk investasi langsungnya yaitu dengan pembukaan perkebunan, kelapa sawit dan pabrik pengelolaan kelapa sawit dimana pelaku usaha perkebunan kelapa sawit ini dapat dilakukan oleh perusahaan perkebunan. Di dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perkebunan, yang berbunyi :

“Perusahaan perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu”.

²⁵ Eduardus Tandelilin, op cit, hlm 6.

²⁶ <http://djgbierz.blogspot.com/2011/01/investasi-langsung.html> pada tanggal 25 Maret 2013 pukul 13.49 WIB

2. Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup

a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal)

Pembangunan dengan lingkungan hidup terdapat pertentangan (konflik), karena setiap pembangunan selalu memiliki dampak terhadap lingkungan hidup. Hal-hal yang bertentangan baru akan terjadi apabila setiap pembangunan yang dijalankan selalu membawa kerugian-kerugian yang besar. Timbulnya kerugian sebagai resiko yang berasal dari aktivitas yang ditujukan terhadap lingkungan ialah jika sebelumnya tidak dipertimbangkan seberapa jauh kemampuan suatu lingkungan dapat menerima aktivitas (pembangunan) yang ada.²⁷

Kemampuan lingkungan dapat dilihat dari sifat produktifnya, sifat daya pulihnya, sifat adaptasinya, dan sifat kemampuan menerima segala keadaan eksternal sebagai faktor yang memengaruhi kemampuan lingkungan, yang dapat dilihat dari sudut sifat atau faktor-faktor tersebut menjadi landasan penting untuk menilai kualitas lingkungan. Semakin produktif suatu alam semakin baik kualitas lingkungan tersebut. Semakin cepat lingkungan beradaptasi atas aktivitas eksternal yang tertuju padanya, maka lingkungan tersebut juga disebut berkualitas. Sebaliknya, jika tingkat kemampuan lingkungan tetap terlampaui oleh aktivitas pembangunan, maka terjadilah kerusakan lingkungan. Faktor yang seringkali terjadi karena faktor eksternal lebih besar daripada kemampuan suatu lingkungan.²⁸

²⁷ N.H.T. Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, hlm 236.

²⁸ *Ibid*

Dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktivitas yang dapat bersifat alamiah, baik kimia, fisik maupun biologi.²⁹ Adanya perkebunan kelapa sawit ini memberikan dampak positif maupun dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Dampak positif yang ditimbulkan dengan adanya perkebunan kelapa sawit ini antara lain : memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan penerimaan devisa negara, meningkatkan produktivitas dan daya saing, serta memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri.³⁰

Adapun dampak negatif akibat perkebunan kelapa sawit antara lain :³¹

1. Persoalan tata ruang yaitu monokultur, homogenitas dan overloads konversi. Hilangnya keaneka-ragaman hayati akan memicu kerentanan kondisi alam berupa menurunnya kualitas lahan disertai erosi, hama dan penyakit.
2. Pembukaan lahan sering kali dilakukan dengan cara tebang habis dan *land clearing* dengan cara pembakaran demi efisiensi biaya dan waktu.
3. Kerakusan unsur hara, karena pertumbuhan kelapa sawit harus dirangsang oleh berbagai macam zat fertilizer sejenis pestisida dan bahan kimia lainnya yang mempengaruhi kesuburan lingkungan.
4. Pengurasan air tanah dan pencemaran air permukaan. Tanaman kelapa sawit memiliki perakaran serabut yang tidak dapat menampung dan menyimpan air di

²⁹ *Ibid.* hlm 43.

³⁰ http://www.just_share.com/2011/kelapa-sawit-penyebab-kerusakan-lingkungan.html pada tanggal 14 Mei 2013 pukul 11.00, posted oleh Esven L F Girsang

³¹ <http://www.sawitwatch.or.id/index.php?option=comcontent&task=view&id=40&Itemid=1> pada tanggal 14 Mei 2013 pukul 10.37, ditulis oleh Saiful Achmad

dalam tanah. Tanaman kelapa sawit memerlukan ± 15 liter air per hari per pokok tanaman untuk kebutuhan pertumbuhan dan produksi yang baik. Satu batang kelapa sawit menyedot air 20 sampai 40 liter sehari sampai kedalaman 5,2 meter.³²

5. Bentuk daun dan tajuk tanaman kelapa sawit

Tanaman kelapa sawit memiliki bentuk daun panjang meruncing dengan tajuk 2 hingga 6 meter yang padat sehingga sulit ditembus air hujan. Hal ini mengakibatkan air hujan akan langsung jatuh ke permukaan bumi dan langsung mengalir ke sungai sehingga akan menjadikam sungai dangkal. Sungai yang telah mengalami pendangkalan bila musim hujan datang dengan curah hujan tinggi sungai akan meluap sehingga akan terjadi banjir.³³

6. Pemanasan Global

Membuka lahan untuk perkebunan kelapa sawit mempengaruhi meningkatnya perubahan suhu seperti pemanasan global. Kelapa sawit hanya mampu menyerap 180 ton gas karbon monoksida, sedangkan gas karbon monoksida yang dikeluarkannya hamper tiga sampai tujuh kali lipat, atau 625 sampai 1357 ton.³⁴

7. Munculnya jenis hama baru, karena keterbatasan lahan dan jenis tanaman akibat monokulturasi.

³² http://TheBoven_Digoel_Post/2013/Dampak-Negatif-Ekspansi-Perkebunan-Kelapa-Sawit.html pada tanggal 21 Februari 2013 pukul 15.40, posted Silas Selan

³³ <http://Irwan.blog.com/2009/31/dampak-tanaman-kelapa-sawit-terhadap-lingkungan.html> pada tanggal 14 Mei 2013 pukul 10.39, posted Irwan, S.Hut

³⁴ http://TheBoven_Digoel_Post/2013/Dampak-Negatif-Ekspansi-Perkebunan-Kelapa-Sawit.html pada tanggal 21 Februari 2013 pukul 15.40, posted Silas Selan

8. Pencemaran yang diakibatkan oleh asap hasil dari pembukaan lahan dengan cara pembakaran dan pembuangan limbah.
9. Terjadinya konflik horizontal dan vertikal akibat masuknya perkebunan kelapa sawit. Misalnya, konflik antar warga yang menolak dan menerima masuknya perkebunan sawit dan bentrokan yang terjadi antara masyarakat dengan aparat pemerintah akibat sistem perizinan perkebunan sawit.
10. Dalam prakteknya pembangunan perkebunan kelapa sawit tidak hanya terjadi pada kawasan hutan konversi, melainkan juga dibangun pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung.
11. Persaingan dengan sumber-sumber pangan lokal

Penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar minyak alternatif juga mendorong perluasan perkebunan, yang memperparah perambahan hutan. Hal ini dipengaruhi dua faktor, yaitu :

- 1) Ancaman akan konversi lahan tanaman pangan menjadi perkebunan sawit
- 2) Meningkatnya kebutuhan bahan bakar minyak sehingga perlu dilakukannya penanaman kelapa sawit.

Faktor-faktor tersebut memungkinkan kenaikan harga-harga pangan sebagai bahan pokok. Berbagai sumber pangan lokal terancam oleh ekspansi sawit, terutama anggota-anggota keluarga palma yang lain seperti, kelapa, pinang, dan sagu.

12. Eksploitasi buruh, khususnya buruh perempuan, yakni :

- (a) Lemahnya perlindungan dan jaminan ketenagakerjaan buruh perempuan

- (b) Beban ganda dan pelabelan yang dialami buruh perempuan. Pelabelan yang dimaksud adalah alpanya pemberian cuti haid dan cuti melahirkan
- (c) Buruh perempuan mendapatkan tugas-tugas yang sama seperti buruh laki-laki, seperti pembersihan semak belukar (*land clearing*), bahkan dalam keadaan haid dan hamil sekalipun yang sangat beresiko terhadap kesehatan reproduksi perempuan.³⁵

Adanya dampak-dampak tersebut, harus adanya pula upaya-upaya penanggulangan agar kerusakan lingkungan dapat teratasi. Upaya-upaya penanggulangan tersebut antara lain :³⁶

- 1) Perkebunan kelapa sawit harus dilaksanakan dengan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan
- 2) Setiap perusahaan perkebunan kelapa sawit harus memiliki Analisis Dampak Lingkungan (Amdal)
- 3) Perusahaan kelapa sawit perlu dimonitor untuk memberikan upah yang layak bagi para pekerjanya, selain jaminan kesehatan dan pendidikan bagi keluarganya
- 4) Pemerintah harus melakukan audit lingkungan secara berkala dan pemantauan efektif
- 5) Tidak mengalihfungsikan lahan pertanian menjadi lahan perkebunan, melakukan rehabilitasi lahan kritis dan penghijauan.³⁷

³⁵ *Ibid*, posted Silas Selan

³⁶ Journal Yusman Syaukat, Menciptakan Daya Saing Ekonomi dan Lingkungan Industri Kelapa Sawit Indonesia

Berbagai dampak negatif dan positif dari kegiatan pembangunan terhadap lingkungan perlu diketahui masyarakat dan pengambilan keputusan agar bisa dipilih langkah tindak pembangunan secara bertanggung jawab. Amdal dapat membantu para pengusaha memilih teknologi dan alat-alat produksi yang dapat menekan/memperkecil dampak negatif lingkungan, sehingga kelengkapan data informasi sangat diperlukan supaya diketahui apa yang menjadi akibat dari kegiatan pembangunan. Menentukan besar kecilnya dampak negatif ialah gambaran cita-cita mengenai kualitas lingkungan yang ingin dicapai, seangkan bobot penilaian terhadap besar kecilnya dampak dipengaruhi oleh mutu lingkungan yang akan dicapai. Salah satu orientasi hukum lingkungan adalah menekankan prinsip-prinsip pencegahan (*preventing oriented*) yang dapat dilihat dalam berbagai peraturan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pelestarian berasal dari kata lestari yang mempunyai makna langgeng, tidak berubah. Jika dikaitkan dengan lingkungan, maka berarti bahwa suatu lingkungan tersebut tidak boleh mengalami perubahan, tetap dalam keadaan aslinya.³⁷ Pelestarian lingkungan bermakna melestarikan lingkungan dalam rangka kawasan pelestarian alam dan kawasan suaka alam. Wajibnya pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan

³⁷ <http://www.antarabengkulu.com/berita/2556/bengkulu-hadapi-ancaman-kerusakan-lingkungan> pada tanggal 14 Mei 2013 pukul 10.45 Publishhed Ulayat Bengkulu

³⁸ Koesnadi Hardjosoemantri, 2005, *Hukum Tata Lingkungan*, edisi 8, cetakan 19, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm 98.

hidup di atur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, yang berbunyi :

” Setiap pelaku usaha perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakannya.”

Pentingnya prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan melestarikan fungsi lingkungan hidup, diperlukannya Analisis Dampak Lingkungan sebagai sistem analisis atas sejauh mana dampak atau pengaruh-pengaruh yang timbul terhadap suatu kegiatan yang akan direncanakan.³⁹ Pada Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dikatakan bahwa :

“Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan”

Dalam Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan yang berbunyi :

“Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.”

Dari pengertian di atas menunjukkan bahwa setiap rencana aktivitas manusia, khususnya dalam rangka pembangunan yang selalu membawa dampak dan perubahan terhadap lingkungan perlu dikaji (dianalisis) lebih dahulu secara seksama.

³⁹ *Ibid*, hlm 238.

Berdasarkan kajian yang diperoleh, maka akan dapat diidentifikasi dampak-dampak yang timbul, baik yang bermanfaat maupun yang merugikan bagi kehidupan manusia.

Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) ini bertujuan agar lingkungan dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan kata lain perubahan lingkungan yang disebabkan oleh pembangunan, baik yang direncanakan maupun yang terjadi diluar rencana, tidak akan menurunkan atau menghapus kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan pada tingkat kualitas hidup yang lebih tinggi. Didalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi :

- “ (1) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki amdal.
- (2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria :
 - a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan
 - b. luas wilayah penyebaran dampak
 - c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung
 - d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak
 - e. sifat kumulatif dampak
 - f. terbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
 - g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Pengertian dampak penting tersebut dijelaskan didalam Pasal 1 butir 5 Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin Lingkungan yang berbunyi :

”Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.”

Di dalam Analisis Dampak Lingkungan, ada dua jenis batasan tentang dampak, yaitu :⁴⁰

1. Dampak pembangunan terhadap lingkungan ialah perbedaan antara kondisi lingkungan sebelum ada pembangunan dan yang diperkirakan akan ada setelah ada pembangunan
2. Dampak pembangunan terhadap lingkungan ialah perbedaan antara kondisi lingkungan yang diperkirakan akan ada tanpa adanya pembangunan dan yang diperkirakan akan ada dengan adanya pembangunan tersebut.

Secara yuridis, dikatakan bahwa izin tidak akan mungkin diberikan jika Amdal tidak lebih dahulu dilakukan, karena “apabila suatu rencana kegiatan diwajibkan melaksanakan analisis dampak lingkungan (Andal), maka persetujuan atas analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) tersebut harus diajukan bersama dengan permohonan izin melakukan kegiatan”.⁴¹

b. Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Investasi dan Pelestarian Lingkungan

Investor dalam negeri maupun investor asing yang turut serta dalam pelaksanaan investasi merupakan salah satu dampak terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu. Pelaksanaan investasi yang dilakukan para investor ini berbentuk investasi langsung berupa pembukaan perusahaan-perusahaan. Seiringnya

⁴⁰ Otto Soemarwoto, 1992, *Analisis Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm 44.

⁴¹ N.H.T. Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, hal 244.

waktu, investasi di Provinsi Bengkulu semakin berkembang. Hal ini dapat dilihat dengan adanya perusahaan-perusahaan batu bara, perkebunan, usaha mikro dan makro dan lain sebagainya. Perkembangan investasi di provinsi Bengkulu yang sangat signifikan terjadi dalam sektor pertanian, karena sejak dahulu mayoritas masyarakat provinsi Bengkulu bekerja sebagai petani. Banyaknya lahan yang belum terolah mengundang para investor untuk berinvestasi di provinsi Bengkulu, terutama dalam sektor perkebunan kelapa sawit. Semakin lama jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit di provinsi Bengkulu semakin meningkat. Ini membuktikan bahwa, investasi dalam sektor perkebunan kelapa sawit menguntungkan pihak investor maupun masyarakat.

Berkembangnya investasi di provinsi Bengkulu, tentu adanya peran dari pemerintah dalam pengembangan investasi guna mewujudkan pembangunan nasional. Salah satu peran pemerintah dalam pengembangan investasi ini dengan dikeluarkannya aturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang mengatur kegiatan investasi yang dilakukan oleh investor. Pemerintah juga ikut serta dalam memantau kegiatan investasi melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) di Provinsi Bengkulu. Investasi yang dilakukan melalui perusahaan atau perseroan terbatas (PT), pemerintah juga mengeluarkan aturan kebijakan yaitu Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas agar perusahaan yang ada tidak bertindak sewenang-wenang.

Pelaksanaan investasi oleh investor dalam mencari keuntungan, sering mengabaikan landasan aturan yang semestinya dalam mengelola usaha atau kegiatan yang mereka lakukan, khususnya menyangkut bidang sosial dan lingkungan hidup, sehingga menimbulkan permasalahan lingkungan. Menurut Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup (1997), kebijakan daerah dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup khususnya permasalahan kebijakan dan penegakan hukum yang merupakan salah satu permasalahan lingkungan hidup di daerah dapat meliputi :⁴²

- 1) Regulasi Perda tentang Lingkungan.
- 2) Penguatan Kelembagaan Lingkungan Hidup.
- 3) Penerapan dokumen pengelolaan lingkungan hidup dalam proses perijinan
- 4) Sosialisasi tentang peraturan perundangan dan pengetahuan lingkungan hidup.
- 5) Meningkatkan kualitas dan kuantitas koordinasi dengan instansi terkait
- 6) Pengawasan terpadu tentang penegakan hukum lingkungan.
- 7) Memformulasikan bentuk dan macam sanksi pelanggaran lingkungan hidup.
- 8) Peningkatan pendanaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Pemerintah sebagai lembaga tertinggi dalam suatu Negara berwenang untuk mengatur ataupun mengendalikan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen I-IV Pasal 33 yang mengatur tentang sumber-sumber Negara yang menguasai hajat hidup orang

⁴² <http://www.trit0824.student.ipb.ac.id/ANALISIS-KEBIJAKAN-PEMERINTAH-DALAM-PENGLOLAAN-SUMBER-DAYA-ALAM-YANG-BERKELANJUTAN.html> June 20th, 2010 Author: trit0824 pada tanggal 20 Juni 2013 pukul 14.00 WIB

banyak dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, maka pemerintah melakukan hal-hal sebagai berikut :⁴³

1. Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup
2. Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan kembali sumber daya alam, termasuk sumber genetika.
3. Mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang lain dan/atau subyek hukum lainnya serta pembuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetika
4. Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial
5. Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pemerintah juga telah mengeluarkan perangkat hukum untuk perlindungan terhadap lingkungan hidup yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tugas dan wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah tertuang pada Pasal 63 Ayat (1) (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁴³ <http://tittoarema.blogspot.com/peran-masyarakat-dan-pemerintah-dalam.html>
 Diposkan oleh BOLANG MOTOR RENT pada tanggal 20 Juni 2013 pukul 14.30 WIB

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus turut ikut berperan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, karena kebijakan yang di buat oleh pemerintah tidak hanya ditetapkan untuk dilaksanakan masyarakat tanpa pengawasan lebih lanjut dari pemerintah. Pemerintah memiliki peran agar kebijakan tersebut diterapkan sebagaimana mestinya oleh masyarakat.

F. METODE PENELITIAN

1. Metode dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data yang dikumpulkan bukanlah berupa angka-angka melainkan berasal dari wawancara terhadap informan dan dokumen resmi perusahaan.⁴⁴ Jenis penelitian menggunakan penelitian deskriptif dengan pencarian fakta dan interpretasi yang tepat, dengan memperlajari data-data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumen perusahaan, mengenai kegiatan-kegiatan yang ada di perusahaan, hubungan antara pihak perusahaan dengan masyarakat serta pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan sebelum dan sesudah adanya perusahaan.⁴⁵ Sehingga, dari data-data yang diperoleh dapat digambarkan keadaan yang sebenarnya yang terjadi dilapangan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah yang merupakan salah satu daerah yang memiliki perusahaan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Bengkulu yaitu, PT. Bio Nusantara Teknologi.

⁴⁴ Lexy J Maleong, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, hlm 131.

⁴⁵ Moh. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 16.

3. Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini secara *purposive*, yaitu informan ditentukan sendiri oleh peneliti berdasarkan pertimbangan informan mengetahui permasalahan yang terjadi dan memiliki data-data yang dibutuhkan.⁴⁶ Informan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Bengkulu
2. Dinas Perkebunan Provinsi Bengkulu
3. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu
4. Pihak PT. Bio Nusantara Teknologi
5. Masyarakat sekitar PT. Bio Nusantara Teknologi sebanyak 10 orang
6. Wahana Lingkungan Hidup (WALHI)

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer, yaitu peneliti memperoleh informasi langsung dengan cara observasi langsung di perkebunan kelapa sawit PT. Bio Nusantara Teknologi serta wawancara langsung dengan pihak PT. Bio Nusantara Teknologi, masyarakat sekitar PT. Bio Nusantara Teknologi dan wawancara instansi-instansi lainnya.⁴⁷

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu peneliti memperoleh data melalui buku-buku, jurnal, dokumen, peraturan perundangan, dan situs *website* untuk memperkuat

⁴⁶ Andry Harijanto, 2008, *Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, hlm 24.

⁴⁷ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm 98.

penemuan hasil pengamatan dan informasi hasil wawancara langsung dengan pemilik perusahaan perkebunan kelapa sawit dan masyarakat sekitar serta instansi-instansi lainnya.⁴⁸

5. Teknik Pengumpulan Data

A. Pengamatan

Pengamatan terhadap perkebunan kelapa sawit PT. Bio Nusantara Teknologi yang dilakukan menggunakan alat indra terutama penglihatan dan pendengaran.⁴⁹ Hasil pengamatan berupa data-data yang berguna untuk mengetahui kejadian atau keadaan yang sebenarnya terjadi di perkebunan kelapa sawit PT. Bio Nusantara Teknologi serta masyarakat sekitar lingkungan PT. Bio Nusantara Teknologi.

B. Wawancara

Peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat mengenai dampak investasi sektor perkebunan kelapa sawit terhadap lingkungan di Provinsi Bengkulu kepada informan yang telah ditentukan.⁵⁰ Hasil wawancara diperoleh data-data yang mendukung data hasil pengamatan, sehingga diperoleh data yang akurat untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi.

6. Pengolahan Data dan Analisis Data

Data-data yang diperoleh diolah secara sistematis sehingga data-data tersebut dapat dibaca dan dimengerti. Hasil pengelolaan data tersebut, peneliti melakukan analisis data sehingga menghasilkan data yang dapat menggambarkan keadaan yang

⁴⁸ *Ibid*, hlm 99.

⁴⁹ Lexy J Maleong, op cit, hlm 140.

⁵⁰ Andry Harijanto, op cit, hlm 25.

terjadi di perusahaan perkebunan kelapa sawit dan masyarakat lingkungan sekitar PT. Bio Nusantara Teknologi.⁵¹

Pengolahan dan analisis data kualitatif menekankan analisisnya pada proses pengumpulan data serta hubungan antar fenomena yang terjadi di sekitar perkebunan kelapa sawit PT. Bio Nusantara Teknologi melalui pengamatan langsung dan wawancara kepada pihak yang terkait.⁵²

Analisis data dilakukan dengan cara pengamatan langsung ke perkebunan kelapa sawit PT. Bio Nusantara Teknologi. Menurut Miles dan Humberman tahapan analisis data sebagai berikut :⁵³

1. Pengumpulan Data

Peneliti mencatat semua data secara obyektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan.

2. Reduksi Data

Peneliti mengorganisasikan data-data yang diperoleh untuk memberikan gambaran tentang hasil pengamatan dan wawancara, sehingga dari data-data yang diperoleh hanya data-data yang diperlukan saja yang dianalisis oleh peneliti.

3. Penyajian Data

Data-data yang diperoleh tersusun secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari data-data tersebut.

⁵¹ M. Syamsudin, op cit, hlm 120.

⁵² *Ibid*, hlm 133.

⁵³ Milez, M.B. dan Huberman, A.M. Analisis Data Kualitatif. Penerjemah Tjeptjep Rohendi, UI-Press, Jakarta, hlm 46.

4. Pengambilan keputusan atau verifikasi

Setelah data disajikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Peneliti mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan analisis secara deskriptif-kualitatif yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang diperoleh, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya yang terjadi di perkebunan kelapa sawit dan masyarakat sekitar. Menurut M. Nazir bahwa tujuan deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.⁵⁴

⁵⁴ Moh. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 16.

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Perkebunan Kelapa Sawit Di Provinsi Bengkulu

Pembangunan perkebunan diarahkan dalam rangka menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sektor penghasil devisa negara. Sesuai dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perkebunan, yang berbunyi :

“Perkebunan mempunyai fungsi:

- a. ekonomi, yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional;
- b. ekologi, yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen, dan penyangga kawasan lindung; dan
- c. sosial budaya, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa.”

Salah satu jenis perkebunan yang dominan diminati oleh masyarakat adalah perkebunan kelapa sawit. Di Indonesia, tanaman kelapa sawit merupakan tanaman yang banyak ditanam oleh perusahaan-perusahaan besar, baik pemerintah maupun swasta. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tersebar di wilayah Indonesia. Provinsi Bengkulu merupakan salah satu Provinsi yang memiliki perkebunan kelapa sawit yang tersebar di berbagai wilayah Provinsi Bengkulu, seperti Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kota Bengkulu, Seluma, Kaur dan Kabupaten Mukomuko.⁵⁵ Mayoritas setiap daerah di Provinsi Bengkulu memiliki perkebunan kelapa sawit, baik perkebunan yang

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Dinas Perkebunan pada tanggal 3 Oktober 2013 pada pukul 10.00 WIB

dimiliki oleh masyarakat sendiri maupun perkebunan yang dimiliki oleh perusahaan atau perseroan terbatas (PT).

Potensi perkebunan ditunjang dengan luas lahan perkebunan seluas 1.978.870 Ha dengan hasil kelapa sawit sebanyak 703.335,60 ton. Adapun wilayah pengembangan perkebunan kelapa sawit dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 1.1
Wilayah Potensi Pengembangan Komoditi Kelapa Sawit

No	Nama Daerah	Luas Lahan
1	Kabupaten Bengkulu Selatan	Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 13.806
2	Kabupaten Bengkulu Tengah	Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 7.363
3	Kabupaten Bengkulu Utara	Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 28.358
4	Kabupaten Kaur	Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 7.304
5	Kabupaten Kepahiang	Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 93
6	Kabupaten Lebong	Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 631
7	Kabupaten Muko-Muko	Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 103.053
8	Kabupaten Rejanglebong	Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 429
9	Kabupaten Seluma	Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 31.300
10	Kota Bengkulu	Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 1.824

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Bengkulu

Beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Provinsi Bengkulu, antara lain :

Tabel 1.2
Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Di Provinsi Bengkulu

No.	Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit	Penanam Modal
1.	PT. Daria Dharma Pratama	PMDN
2.	PT. Agricinal	PMDN
3.	PT. Agri Andalas	PMDN
4.	PT. Bio Nusantara Teknologi	PMDN
5.	PTPN VII	PMDN

6.	PT. Harmoni Agri Kencana	PMDN
7.	PT. Alno Agro Utama	PMA
8.	PT. Laras Prima Sakti	PMA
9.	PT. Riau Agri Agung	PMA
10.	PT. Dimas Raya Sawit Tindo	PMA
11.	PT Agro Muko	PMA
12.	PT Mitra Puding Mas	PMA
13.	PT. Muko Agro Sejahtera	PMA
14.	PT. Indo Mewah Mas	PMA
15.	PT. Indo Mewah Mas	PMA

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Bengkulu dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Bengkulu

B. PT. Bio Nusantara Teknologi

a. Sejarah dan Struktur PT. Bio Nusantara Teknologi

PT. Bio Nusantara Teknologi (BNT) berdiri tahun 1980 berdasarkan akte Notaris No. 211. Pada awalnya Perseroan Terbatas ini bertujuan untuk menjalankan usaha-usaha pada bidang perkebunan, perikanan darat / laut, serta mengadakan beberapa riset / penelitian. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kegiatan survey lahan dan kegiatan-kegiatan penelitian, antara lain ;

- a. Survey lahan perkebunan Sawit di Kecamatan Kerkap, Bengkulu Utara.
- b. Survey areal rencana Tambak Udang di daerah Seluma, Tais Bengkulu Selatan.
- c. Survey lahan perkebunan Sawit di Kecamatan Pondok Kelapa, Bengkulu Utara (Areal PT.BNT sekarang).
- d. Beberapa kegiatan penelitian di bidang Budidaya Kacang Kedelai, Bambu, Kayu Sungkai, dll.

- e. Setelah menjalani beberapa kali survey penelitian kesesuaian lahan dan komoditi terbukti bahwa perkebunan Kelapa Sawit-lah yang sampai saat ini tetap exist dan memiliki prospek yang baik.

Selanjutnya gagasan dan petunjuk dari Sutan Takdir Alisjahbana (STA) ini, R.H.Hanafiah Ais beserta team terus mengupayakan ketersediaan lahan tersebut, dan keberhasilan tentu sangat ditunjang oleh kedekatan beliau dengan masyarakat setempat, pejabat dan instansi terkait. Sehingga pada tahun 1980 izin prinsip telah didapat dan operasional pembukaan lahan telah dimulai hingga keberadaannya sekarang ini. Kewenangan R.H.Hanafiah Ais didalam menjalankan operasional kerja, baik internal maupun external maka pada tanggal 28-01-1981 Presiden Direktur Sofjan Alisjahbana menerbitkan surat kuasa pada akta Notaris yang intinya memberikan kuasa khusus kepada R.H. Hanafiah untuk bertindak sebagai kuasa Direksi di Bengkulu yang sampai saat ini belum pernah dicabut. Adapun luas lahannya :

Tabel 1.3
Luas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bio Nusantara Teknologi

1. Tanaman Menghasilkan (TM)	4.091,41 Ha.
2. Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)	0,00 Ha.
1) NonTanaman :	
- Lahan Konservasi	1.289,17 Ha.
- Areal Cadangan	447,00 Ha.
- Jalan, Perumahan dan Perkantoran	447,00 Ha.
Jumlah	2.343,17 Ha.
TOTAL	6.434,58 Ha.

Topografi areal 80% berbukit (lahan kelas IV), secara umum jenis tanah Podzolik merah kuning dan kesesuaian curah hujan cukup ideal untuk pertumbuhan Kelapa Sawit. Secara Geografis terletak antara 30331 - 30421 LS, dan 1020161 – 1020271 BT, dengan jarak \pm 24 KM sebelah Utara Kota Bengkulu dengan kondisi letak / lokasinya berbatasan langsung dengan 4 Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Utara, yaitu :

Batas – batas :

Sebelah Utara Berbatasan dengan : Desa Tiambang, Kec. Pematang Tiga.

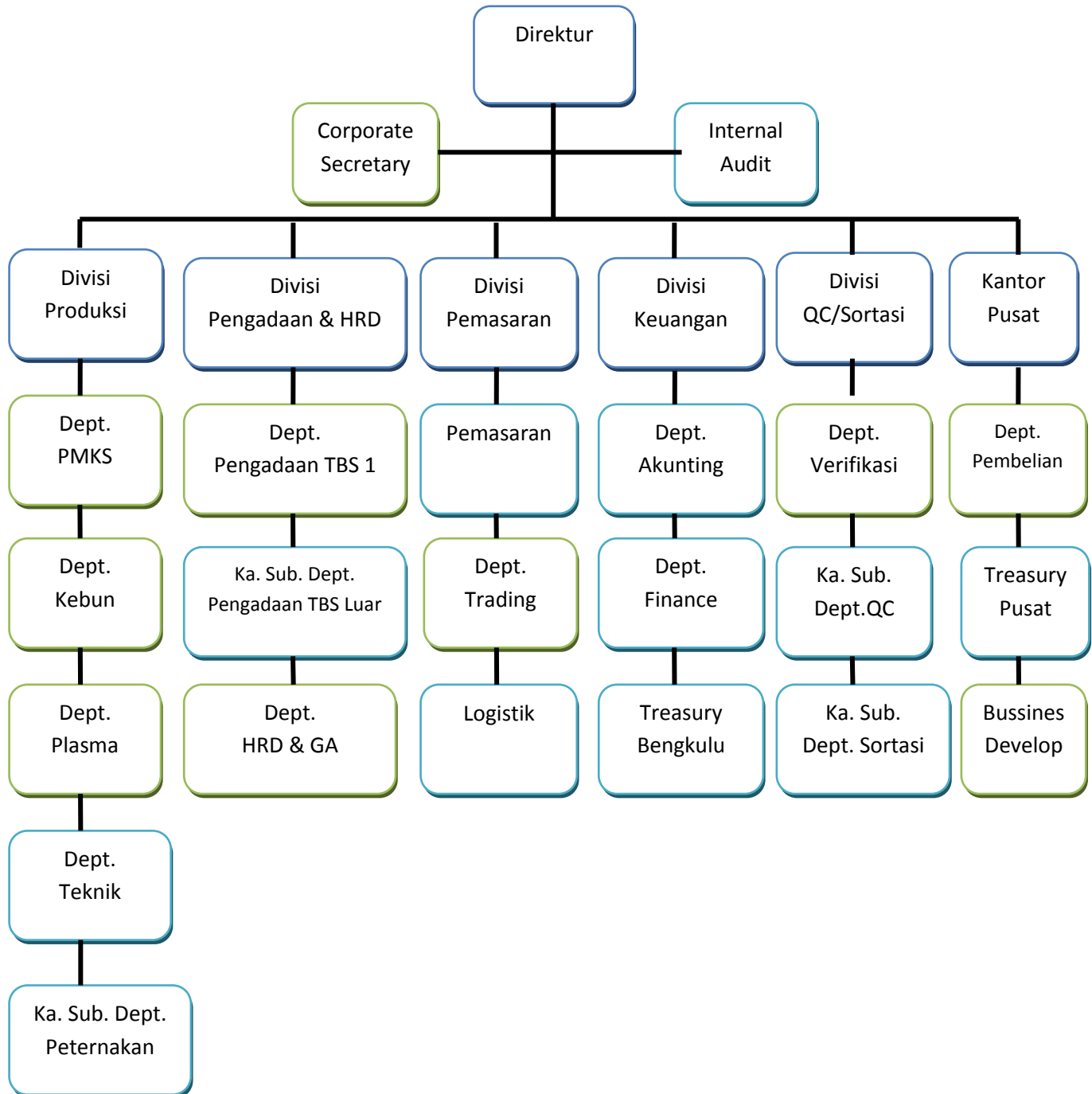
Sebelah Selatan Berbatasan dengan : Desa Sunda Kelapa, Kec. Pondok Kelapa.

Sebelah Barat Berbatasan dengan : Desa Talang Jambu, Kec. Kerkap.

Sebelah Timur Berbatasan dengan : Desa Kertapati, Kec. Taba Penanjung.

PT. Bio Nusantara Teknologi memiliki tenaga kerja sebanyak 1094 orang yang terdiri dari 168 orang pekerja di pabrik pengelolaan dan 926 orang pekerja (harian lepas dan bulanan) di perkebunan.

Struktur Organisasi PT. Bio Nusantara Teknologi



b. Investasi Di PT. Bio Nusantara Teknologi

Penyelenggaraan pembangunan ekonomi nasional adalah untuk mempertinggi kemakmuran rakyat. Modal merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan, sehingga perlu diselenggarakan pemupukan dan pemanfaatan modal dalam negeri dengan cara rehabilitasi pembaharuan, perluasan, pemnbangunan dalam bidang produksi barang dan jasa. Selain itu, perlu diciptakan iklim yang baik dan ditetapkan ketentuan-ketentuan yang mendorong investor dalam negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Pembangunan ekonomi selayaknya disandarkan pada kemampuan rakyat Indonesia sendiri dengan memanfaatkan modal dalam negeri yang dimiliki. Penanaman modal dalam suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dari usaha tersebut menjadikan investasi sebagai wahana dimana dana ditempatkan dengan harapan untuk dapat memelihara atau menaikkan nilai atau memberikan hasil yang positif.⁵⁶

PT. Bio Nusantara Teknologi merupakan salah satu perkebunan dan pabrik pengelolaan kelapa sawit yang ada di Bengkulu. Investasi yang ada di PT. Bio Nusantara Teknologi ialah investasi dalam negeri (penanam modal dalam negeri). Di dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan, bahwa :

“Penanam modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri “

⁵⁶ Salim H. S. dan Budi Sutrisno, 2008, *Hukum Investasi di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 174.

Dimaksud dengan penanam modal dalam negeri dijelaskan dalam Pasal 1 butir 5

Undang-Undang No 25 tahun 2007 yang menyebutkan :

“Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.”

Adapun syarat-syarat melakukan penanaman modal dalam negeri, adalah sebagai berikut :

1) Permodalan

Menggunakan modal yang merupakan kekayaan masyarakat Indonesia baik langsung maupun tidak langsung. PT. Bio Nusantara Teknologi menggunakan modal dari keluarga besar Alisjahbana yang sebagian besar anggota keluarganya adalah pengusaha nasional yang sukses. Kesuksesan keluarga Alisjahbana ini dapat dilihat dari bidang percetakan dan penerbitan buku-buku, tambak udang serta pertanian rumah kaca dan lain sebagainya.

2) Pelaku Investasi

Negara dan swasta. Pihak swasta dapat terdiri dari orang dan atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia. Pelaku investasi di PT. Bio Nusantara Teknologi ini merupakan pihak swasta yaitu keluarga Alisjahbana, yang didirikan pada tahun 1980 berdasakan akta Notaris No. 211.

3) Bidang usaha

Semua bidang yang terbuka bagi swasta, yang dibina, dipelopori atau dirintis oleh pemerintah. Bidang usaha di PT. Bio Nusantara Teknologi merupakan bidang

usaha perkebunan kelapa sawit dengan kegiatan perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit.

4) Perizinan dan perpajakan

Memenuhi perizinan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, seperti izin usaha, lokasi, pertanahan, perairan, eksplorasi, hak-hak khusus, dll. Adapun PT. Bio Nusantara Teknologi telah memiliki :

1. Hak Guna Usaha (HGU) No. 421/HGU/BPN 1997 masa berlaku hingga 31 Desember 2025
2. HO (Pemberian Izin Usaha) Perkebunan Kelapa Sawit No. 503/841/B-4/2000
3. HO (Pemberian Izin Usaha) PMKS No. 503/840/B-4/2000
4. Izin Usaha Tetap (Pendirian Pabrik) No. 172/INDUSTRI/2000
5. Nomor Pokok Wajib Pajak No. 1.343.146.5-311.000

5) Batas waktu berusaha

Sesuai dengan Hak Guna Usaha (HGU) No. 421/HGU/BPN 1997, maka batas waktu berusaha PT. Bio Nusantara Teknologi adalah 31 Desember 2025.

6) Tenaga kerja

PT. Bio Nusantara Teknologi memiliki tenaga kerja sebanyak 1074 orang yang mayoritas merupakan masyarakat sekitar PT. Bio Nusantara Teknologi.

c. Tanggung Jawab PT. Bio Nusantara Teknologi Terhadap Lingkungan

PT. Bio Nusantara Teknologi merupakan perusahaan swasta nasional yang berkegiatan perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit. Pabrik kelapa sawit ini

dibangun pada tahun 1994 dan mulai produksi pada bulan Januari 1997. Kegiatan-kegiatan pabrik kelapa sawit, meliputi :

1. Pengangkutan tandan buah segar (TBS) ke pabrik
2. Perebusan tandan buah segar (TBS)
3. Perontokan dan pelumatan buah
4. Pemerasan / ekstraksi minyak kelapa sawit
5. Pemurnian dan penjernihan
6. Pengeringan dan pemecahan biji

Kegiatan - kegiatan yang dilakukan oleh PT. Bio Nusantara Teknologi baik kegiatan perkebunan maupun kegiatan pabrik memberikan dampak terhadap lingkungan. Dampak yang ditimbulkan berupa dampak positif maupun dampak negatif.

Keberadaan perkebunan PT. Bio Nusantara Teknologi di tengah masyarakat yang dikelilingi 24 desa dan 5 kecamatan kabupaten Bengkulu Tengah, sangat mempengaruhi lingkungan sekitar, terutama masyarakat sekitar PT. Bio Nusantara Teknologi. Keberadaan PT. Bio Nusantara Teknologi ditengah-tengah masyarakat inilah yang mewajibkan perusahaan melakukan *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk kebaikan lingkungan sekitar. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan :

“Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”

Dari bunyi pasal tersebut, adanya kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Selain itu, untuk mendukung terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Aturan lain mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan atau yang dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) ini juga diatur didalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyebutkan :

“Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;**
- c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari kedua aturan tersebut, PT. Bio Nusantara Teknologi telah melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada tahun 2011-2012, diantaranya :

1. Bantuan Sosial, seperti :

- a. Memberikan program Plasma yang diperiotaskan bagi desa-desa sekitar perusahaan yang terbentuk dalam kelompok tani
 - b. Pemberian Kas Desa masing-masing 1 juta rupiah per bulan untuk 23 desa dan pemberian honor kepala desa sebesar Rp 400.000,- per bulan kepada masing-masing kepala desa
 - c. Pendirian PAUD 2 tempat yang diperuntukan untuk pendidikan anak-anak karyawan maupun anak-anak diluar anak karyawan perusahaan
 - d. Bakti sosial sunat missal peserta dari anak-anak karyawan perusahaan dan dari anak-anak desa sekitar perusahaan. (lihat gambar pada lampiran)
2. Bantuan Infra Struktur, seperti :
- a. Bantuan pembuatan akses jalan desa, Desa Lubuk Langkap Kecamatan Bang Haji
 - b. Pemadatan jalan Desa Kota Titik Kecamatan Pematang Tiga
 - c. Bantuan pembuatan jalan poros dan bantuan gorong-gorong menuju Desa Pagar Dewa
 - d. Bantuan penimbunan lapangan/ halaman kantor Kecamatan Bang Haji
 - e. Dll.
3. Bantuan Sarana Pendidikan dan Olahraga
- a. Bantuan sarana olahraga SD Negeri 06 Desa Genting
 - b. Bantuan berupa uang tunai untuk perbaikan SDN Desa Kembang Ayun Kecamatan Pondok Kelapa

- c. Bantuan saran olahraga Karang Taruna Desa Talang Jambu Kecamatan Kerkap Bengkulu Utara
 - d. Bantuan proposal TPQ Desa Sekayun Ilir
 - e. Bantuan dana pengiriman tim sepak bola dari Desa Aturan Mumpo II dalam rangka HUT Bengkulu Tengah
 - f. Dll.
4. Bantuan Sarana Ibadah, dan lain-lain.
- a. Bantuan dana pembangunan masjid Alfalah Desa Talang Tengah
 - b. Bantuan material pembangunan masjid Desa Kota Titik Kecamatan Pematang Tiga
 - c. Bantuan dana peresmian pemekaran Desa Harapan Kecamatan Pondok Kelapa
 - d. Bantuan proposal hari Kartini Desa Giri Mulya Bengkulu Utara
 - e. Dll.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) PT. Bio Nusantara Teknologi

1. Kriteria Kegiatan Wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal)

Pembangunan dengan lingkungan hidup terdapat pertentangan (konflik), karena setiap pembangunan selalu memiliki dampak terhadap lingkungan hidup. Tujuan pembangunan pada dasarnya dianggap baik, pantas dan/atau seharusnya ada, menurut penyelenggara pembangunan. Akan tetapi, pembangunan tidak selalu berbuah hal-hal yang positif bagi mereka. Hal ini berarti, pembangunan dapat menimbulkan konsekuensi negatif bagi suatu komunitas atau bagi suatu segmen dari komunitas. Dampak negatif pembangunan tersebut tidak selalu disadari dan atau tidak selalu tampak kepermukaan.⁵⁷

Dampak dalam Bahasa Inggris disebut *impact* yang bersinonim dengan *effect* (akibat) atau *consequences* (akibat). Dalam Bahasa Indonesia dampak berarti pengaruh kuat yang mendatangkan akibat. Berdampak mengandung arti berpengaruh atau akibat-akibat yang ditimbulkan oleh pembangunan. Dampak tersebut terdiri dari.⁵⁸

⁵⁷ Makalah Prof. Dr. Afrizal, MA yang berjudul *Menganalisis Dampak Sosial Pembangunan* Tahun 2008

⁵⁸ Otto Soemarwoto, 1992, *Analisis Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm 47.

- a. Dampak positif. Dampak yang dianggap baik oleh penyelenggara pembangunan maupun oleh orang lain.
- b. Dampak negatif. Dampak yang dianggap tidak baik oleh penyelenggara pembangunan maupun oleh orang lain.
- c. Dampak yang disadari (*intended consequences*).
- d. Dampak yang tidak disadari (*unintended consequences*).

Kesadaran terhadap lingkungan hidup di negara Indonesia semakin membaik, walaupun masih sangat rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain, hal ini dibuktikan dengan gencarnya isu-isu lingkungan yang mulai banyak dibicarakan di media massa, salah satunya adalah tentang analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) suatu kawasan.⁵⁹

Amdal adalah singkatan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang merupakan suatu kajian mengenai dampak positif dan negatif dari suatu rencana kegiatan/usaha, yang dipakai pemerintah dalam memutuskan apakah suatu kegiatan/usaha layak atau tidak layak lingkungan. Kajian dampak positif dan negatif tersebut biasanya disusun dengan mempertimbangkan aspek fisik, kimia, biologi, sosial-ekonomi, sosial-budaya, dan kesehatan masyarakat.⁶⁰

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dilakukan untuk menilai kelayakan lingkungan dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Melalui proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), suatu kegiatan yang dinyatakan

⁵⁹ <http://awaluddin.web.id/archives/234> pada tanggal 4 September 2013 pukul 12.30 WIB

⁶⁰ *Ibid.*

layak lingkungan akan memperoleh Surat Kelayakan Lingkungan. Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Kelayakan Lingkungan adalah Menteri Negara Lingkungan Hidup di tingkat penilaian pusat, Gubernur di tingkat provinsi, Bupati/Walikota di tingkat kabupaten/ kota. Surat Kelayakan Lingkungan dibutuhkan oleh instansi pemberi izin sebagai pasyarat penerbitan Izin Lingkungan bagi suatu kegiatan.

Dalam Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan, bahwa :

“Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal”.

Yang dimaksud dengan dampak penting sesuai dengan Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan adalah :

“Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.”

Adapun kriteria kegiatan yang berdampak penting sesuai dengan penjelasan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan terdiri atas :

- a. Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan
- b. Luas wilayah penyebaran dampak
- c. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung
- d. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak
- e. Sifat kumulatif dampak

- f. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
- g. Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan, bahwa :

“Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan Amdal terdiri atas:

- a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam
- b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
- c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
- d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial budaya;
- e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
- f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
- g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
- h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
- i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.”

Kegiatan-kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan yang disebutkan dalam Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan secara lebih spesifik dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 tahun 2012 tentang Jenis Rencana Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis

Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Pada bidang pertanian dapat dilihat jenis kegiatan seperti pada tabel di bawah ini :⁶¹

Tabel 1.4
Jenis Kegiatan Berdampak Penting

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1.	Budidaya tanaman pangan dengan atau tanpa unit pengolahannya, dengan luas	≥ 2.000 ha	Kegiatan akan berdampak terhadap ekosistem, hidrologi dan bentang alam.
2.	Budidaya tanaman hortikultura dengan atau tanpa unit pengolahannya, dengan luas	≥ 5.000 ha	
3.	Budidaya tanaman perkebunan		
	a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya: 1) Dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas	≥ 2.000 ha	
	2) Dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), luas	≥ 2.000 ha	
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya: 1) Dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas	≥ 3.000 ha	
	2) Dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), luas	≥ 3.000 ha	

Pada umumnya dampak penting yang ditimbulkan usaha budidaya tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan berupa erosi tanah, perubahan ketersediaan dan

⁶¹Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 tahun 2012 tentang Jenis Rencana Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

kualitas air akibat kegiatan pembukaan lahan, persebaran hama, penyakit dan gulma pada saat beroperasi, serta perubahan kesuburan tanah akibat penggunaan pestisida/herbisida. Disamping itu sering pula muncul potensi konflik sosial dan penyebaran penyakit endemik.

Skala/besaran yang tercantum dalam tabel di atas telah memperhitungkan potensi dampak penting kegiatan terhadap ekosistem, hidrologi, dan bentang alam. Skala atau besaran tersebut merupakan luasan rata-rata dari berbagai uji coba untuk masing-masing kegiatan dengan mengambil lokasi di daerah dataran rendah, sedang, dan tinggi.⁶²

PT. Bio Nusantara Teknologi tidak memiliki dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), namun memiliki dokumen berupa Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH). Definisi Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari proses audit lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen amdal.

2. Prosedur Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal)

Prosedur penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), dijelaskan didalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun

⁶² Lampiran I Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

2006 Tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Lampiran I sampai Lampiran V, yaitu :

1. Proses Penapisan (*screening*) Wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal)

Proses penapisan atau proses seleksi wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) adalah proses untuk menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) atau tidak. Di Indonesia, proses penapisan dilakukan dengan sistem penapisan satu langkah. Ketentuan apakah suatu rencana kegiatan perlu menyusun dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) atau tidak dapat dilihat pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

2. Proses Pengumuman

Setiap rencana kegiatan yang diwajibkan untuk membuat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) wajib mengumumkan rencana kegiatannya kepada masyarakat sebelum pemrakarsa melakukan penyusunan Amdal. Pengumuman dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab dan pemrakarsa kegiatan. Tata cara dan bentuk pengumuman serta tata cara penyampaian saran, pendapat dan tanggapan diatur dalam Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 08/2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Amdal.

3. Proses Pelingkupan (*scoping*)

Pelingkupan merupakan suatu proses awal untuk menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting (hipotetis) yang terkait dengan rencana kegiatan. Tujuan pelingkupan adalah untuk menetapkan batas wilayah studi, mengidentifikasi dampak penting terhadap lingkungan, menetapkan tingkat kedalaman studi, menetapkan lingkup studi, menelaah kegiatan lain yang terkait dengan rencana kegiatan yang dikaji. Hasil akhir dari proses pelingkupan adalah dokumen KA-ANDAL. Saran dan masukan masyarakat harus menjadi bahan pertimbangan dalam proses pelingkupan.

4. Penyusunan dan Penilaian KA-ANDAL

Setelah KA-ANDAL selesai disusun, pemrakarsa dapat mengajukan dokumen kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal penilaian KA-ANDAL adalah 30 hari di luar waktu yang dibutuhkan penyusun untuk memperbaiki/menyempurnakan kembali dokumennya.

5. Penyusunan dan Penilaian ANDAL, RKL, dan RPL

Penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL dilakukan dengan mengacu pada KA-ANDAL yang telah disepakati (hasil penilaian Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)). Setelah selesai disusun, pemrakarsa dapat mengajukan dokumen kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal penilaian ANDAL, RKL dan RPL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan penyusun untuk memperbaiki/menyempurnakan kembali dokumennya.

6. Persetujuan Kelayakan Lingkungan

Menteri/Gebernur/Bupati akan menerbitkan putusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan 10 hari setelah rekomendasi keluar.

Adapun bentuk hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) berupa dokumen yang terdiri dari 5 (lima) dokumen, yaitu :

1. Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL)

KA-ANDAL adalah suatu dokumen yang berisi tentang ruang lingkup serta kedalaman kajian ANDAL. Ruang lingkup kajian ANDAL meliputi penentuan dampak-dampak penting yang akan dikaji secara lebih mendalam dalam ANDAL dan batas-batas studi ANDAL. Sedangkan kedalaman studi berkaitan dengan penentuan metodologi yang akan digunakan untuk mengkaji dampak. Penentuan ruang lingkup dan kedalaman kajian ini merupakan kesepakatan antara Pemrakarsa Kegiatan dan Komisi Penilai AMDAL melalui proses yang disebut dengan proses pelingkupan.

2. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL)

ANDAL adalah dokumen yang berisi telaahan secara cermat terhadap dampak penting dari suatu rencana kegiatan. Dampak- dampak penting yang telah diidentifikasi di dalam dokumen KA- ANDAL kemudian ditelaah secara lebih cermat dengan menggunakan metodologi yang telah disepakati. Telaah ini bertujuan untuk menentukan besaran dampak. Setelah besaran dampak diketahui, selanjutnya dilakukan penentuan sifat penting dampak dengan cara membandingkan besaran dampak terhadap kriteria dampak penting yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Tahap kajian selanjutnya adalah evaluasi terhadap keterkaitan antara dampak yang satu dengan yang lainnya. Evaluasi dampak ini bertujuan untuk menentukan dasar-dasar pengelolaan dampak yang akan dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif.

3. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)

RKL adalah dokumen yang memuat upaya-upaya untuk mencegah, mengendalikan dan menanggulangi dampak penting lingkungan hidup yang bersifat negatif serta memaksimalkan dampak positif yang terjadi akibat rencana suatu kegiatan. Upaya-upaya tersebut dirumuskan berdasarkan hasil arahan dasar-dasar pengelolaan dampak yang dihasilkan dari kajian ANDAL.

4. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

RPL adalah dokumen yang memuat program-program pemantauan untuk melihat perubahan lingkungan yang disebabkan oleh dampak-dampak yang berasal dari rencana kegiatan. Hasil pemantauan ini digunakan untuk mengevaluasi efektifitas upaya-upaya pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan, ketaatan pemrakarsa terhadap peraturan lingkungan hidup dan dapat digunakan untuk mengevaluasi akurasi prediksi dampak yang digunakan dalam kajian ANDAL.

5. Dokumen Ringkasan Eksekutif

Ringkasan Eksekutif adalah dokumen yang meringkas secara singkat dan jelas hasil kajian ANDAL. Hal hal yang perlu disampaikan dalam ringkasan eksekutif biasanya adalah uraian secara singkat tentang besaran dampak dan sifat penting

dampak yang dikaji di dalam ANDAL dan upaya-upaya pengelolaan dan pemantuan lingkungan hidup yang akan dilakukan untuk mengelola dampak-dampak tersebut.

Dalam proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), ada beberapa pihak yang ikut terlibat, yaitu :

1. Pemerintah

Pemerintah berkewajiban memberikan keputusan apakah suatu rencana kegiatan layak atau tidak layak lingkungan. Keputusan kelayakan lingkungan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan rakyat dan kesesuaian dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Untuk mengambil keputusan, pemerintah memerlukan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, baik yang berasal dari pemilik kegiatan/pemrakarsa maupun dari pihak-pihak lain yang berkepentingan. Informasi tersebut disusun secara sistematis dalam dokumen Amdal.

2. Pemrakarsa

Orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemrakarsa inilah yang berkewajiban melaksanakan kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Meskipun pemrakarsa dapat menunjuk pihak lain (seperti konsultan lingkungan hidup) untuk membantu melaksanakan kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), namun tanggung jawab terhadap hasil kajian dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) tetap di tangan pemrakarsa kegiatan.

3. Masyarakat yang berkepentingan

Masyarakat yang berkepentingan adalah masyarakat yang terpengaruh oleh segala bentuk keputusan dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Masyarakat mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang setara dengan kedudukan pihak-pihak lain yang terlibat dalam Amdal. Di dalam kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), masyarakat bukan obyek kajian namun merupakan subyek yang ikut serta dalam proses pengambilan keputusan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Dalam proses ini masyarakat menyampaikan aspirasi, kebutuhan, nilai-nilai yang dimiliki masyarakat dan usulan-usulan penyelesaian masalah untuk memperoleh keputusan terbaik.

Dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) masyarakat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu;

1. Masyarakat terkena dampak: masyarakat yang akan merasakan dampak dari adanya rencana kegiatan (orang atau kelompok yang diuntungkan, dan orang atau kelompok yang dirugikan)
2. Masyarakat Pemerhati: masyarakat yang tidak terkena dampak dari suatu rencana kegiatan, tetapi mempunyai perhatian terhadap kegiatan maupun dampak-dampak lingkungan yang ditimbulkan.⁶³

⁶³ <http://awaluddin.web.id/archives/234> pada tanggal 7 September 2013 pukul 12.00

Adapun tujuan dilibatkannya masyarakat dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan izin lingkungan tercantum didalam Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, agar:

- a. Masyarakat mendapatkan informasi mengenai rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;
- b. Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;
- c. Masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan rekomendasi kelayakan atau tidaklayakan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;
- d. Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas proses izin lingkungan;

3. Pelaksanaan Dokumen Lingkungan Hidup PT. Bio Nusantara Teknologi

PT. Bio Nusantara Teknologi merupakan perusahaan swasta nasional yang usaha dan/atau kegiatannya adalah perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit. Sejak berdirinya pada tahun 1980 berdasarkan akte Notaris No. 211, PT. Bio Nusantara Teknologi memiliki perkebunan kelapa sawit seluas \pm 2000 ha. Dalam

menjalankan operasional kegiatan PT. Bio Nusantara Teknologi sudah memiliki surat perizinan, yaitu :⁶⁴

1. Hak Guna Usaha (HGU) No. 421/HGU/BPN/1997 yang mana masa berlakunya hingga 31 Desember 2025.
2. Pemberian Izin Usaha (HO) Perkebunan Kelapa Sawit No. 503/841/B-4/2000
3. Pemberian Izin Usaha (HO) PMKS No. 503/840/B-4/2000
4. Izin Usaha Tetap (Pendirian Pabrik) No. 172/INDUSTRI/2000
5. Nomor Pokok Wajib Pajak No. 1.343.146.5-311.000

PT. Bio Nusantara Teknologi merupakan usaha dan/atau kegiatan yang memberikan dampak terhadap lingkungan, baik dampak positif maupun dampak negatif. Segala kegiatan yang dilakukan oleh PT. Bio Nusantara Teknologi baik dari kegiatan perkebunan kelapa sawit maupun kegiatan pabrik memberikan pengaruh bagi lingkungan. Dampak-dampak yang timbul akibat dari kegiatan tersebut haruslah diperhatikan oleh pihak perusahaan, pemerintah dan masyarakat sekitar. Berdasarkan Pasal 121 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, menjelaskan bahwa :

”Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL wajib membuat dokumen pengelolaan lingkungan hidup”

⁶⁴ Diperoleh melalui data Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) PT. Bio Nusantara Teknologi

Dari bunyi pasal diatas, bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan harus membuat dokumen tentang pengelolaan lingkungan hidup yang mana didalamnya memuat tentang rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

PT. Bio Nusantara Teknologi memiliki dokumen UKL-UPL sejak tanggal 19 Agustus 1999 yang disetujui Dirjen PHPA/Ketua Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan dan Perkebunan No. 123/DJ-IV/AMDAL/1999.⁶⁵ Didalam dokumen UKL-UPL PT. Bio Nusantara Teknologi termuat berbagai rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan serta pengkajian mengenai dampak rencana kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup yang berbunyi :

“Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.”

Pada awalnya, PT. Bio Nusantara Teknologi yang hanya memiliki lahan ± 2.000 ha ini tidak termasuk dalam kriteria kegiatan wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), karena dilihat dari penjelasan umum pada Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 tahun 2012 tentang Jenis Rencana dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, bahwa kriteria kegiatan wajib memiliki

⁶⁵ Hasil wawancara di Kantor Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu, narasumber Bapak Syamsir pada tanggal 29 Agustus 2013 pukul 11.00 WIB

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) apabila, budidaya tanaman perkebunan tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya:

- 1) Dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas ≥ 3.000 ha
- 2) Dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), luas ≥ 3.000 ha

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) merupakan instrumen untuk merencanakan tindakan preventif terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas pembangunan. Mengingat fungsinya sebagai salah satu instrumen dalam perencanaan usaha dan/atau kegiatan, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) tidak dilakukan setelah usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) ini dilakukan pada tahap studi kelayakan atau desain detail rekayasa.

Seiring waktu, PT. Bio Nusantara Teknologi pun melakukan perluasan area perkebunan menjadi ± 6.000 ha, serta ditambah dengan adanya pabrik kelapa sawit. Sesuai dengan ketentuan Pasal 121 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi :

“Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen amdal wajib menyelesaikan audit lingkungan hidup.”

Yang dimaksud dengan audit lingkungan hidup sesuai pada Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen

Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup, yaitu :

“Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.”

Setiap perusahaan yang menjalankan suatu usaha dan/atau kegiatan harus memiliki dokumen lingkungan hidup yang merupakan dokumen yang memuat tentang pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Dokumen lingkungan hidup ini terdiri atas :

- a) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)
- b) Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)
- c) Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
- d) Dokumen Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL)
- e) Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (SEMDAL)
- f) Studi Evaluasi Lingkungan Hidup (SEL)
- g) Penyajian Informasi Lingkungan (PIL)
- h) Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL)
- i) Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPL)
- j) Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL)
- k) Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)
- l) Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)
- m) Audit Lingkungan

Pada saat ini, PT. Bio Nusantara Teknologi tidak menggunakan lagi dokumen lingkungan hidup berupa Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya

Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), melainkan telah memiliki Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) sejak Oktober 2011.⁶⁶

Didalam Pasal 1 butir 3 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup, berbunyi :

“Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DELH, adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari proses audit lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen amdal.”

Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang wajib membuat Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) tercantum didalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup, berbunyi :

“DELH atau DPLH wajib disusun oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria :

- a. Telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- b. Telah melakukan kegiatan tahap konstruksi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c. Lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tat ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang kawasan; dan

⁶⁶ Hasil wawancara dengan pihak PT. Bio Nusantara Teknologi, narasumber Bapak Feri pada tanggal 5 September 2013 pukul 13.00 WIB

- d. Tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau memiliki dokumen lingkungan hidup tetapi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Apabila dilihat dari kriteria usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH), maka PT. Bio Nusantara Teknologi sendiri memenuhi kriteria tersebut, dimana PT. Bio Nusantara Teknologi telah memiliki izin usaha berupa :

1. Pemberian Izin Usaha (HO) Perkebunan Kelapa Sawit No. 503/841/B-4/2000
2. Pemberian Izin Usaha (HO) PMKS No. 503/840/B-4/2000
3. Izin Usaha Tetap (Pendirian Pabrik) No. 172/INDUSTRI/2000

Perizinan yang dimiliki oleh PT. Bio Nusantara Teknologi tersebut, memberikan izin kepada PT. Bio Nusantara Teknologi dalam menjalankan kegiatan perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit. Selain itu, PT. Bio Nusantara Teknologi ini pun telah melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini dapat dilihat dari awal berdirinya perkebunan kelapa sawit pada tahun 1980 dan izin usaha yang dimiliki sejak tahun 2000. Hal ini jelas bahwa PT. Bio Nusantara Teknologi telah melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan peraturan perundang-undangan pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Keberadaan PT. Bio Nusantara Teknologi yang terletak di 5 kecamatan dan 24 desa ini memanfaatkan lahan area sekitar perdesaan untuk dijadikan kawasan perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit. Hal ini bertujuan agar adanya pemberdayaan masyarakat perdesaan, keselamatan masyarakat, pertahanan kawasan lahan pertanian dan penjagaan keseimbangan pembangunan antara perdesaan dan perkotaan.⁶⁷ Kriteria selanjutnya, bahwa PT. Bio Nusantara Teknologi telah memiliki dokumen lingkungan hidup berupa dokumen UKL-UPL sejak tanggal 19 Agustus 1999 yang disetujui Dirjen PHPA/Ketua Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan dan Perkebunan No. 123/DJ-IV/AMDAL/1999. Namun, keberlakuan dokumen tersebut tidak sesuai dengan perturan perundang-undangan yang baru yaitu Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan, bahwa :

“Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.”

Penyusunan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup PT. Bio Nusantara Teknologi berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup dengan format sesuai pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak

⁶⁷ <http://www.penataanruang.com/penataan-ruang-kawasan-perdesaan.html> pada tanggal 7 September 2013 pukul 12.00

terpisahkan dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan ditetapkan pada Oktober 2011.

PT. Bio Nusantara Teknologi telah memiliki dokumen lingkungan hidup sejak mulai menjalankan kegiatan perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit. Hal ini sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, dalam menjalankan kegiatan perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit, PT. Bio Nusantara Teknologi belum 100% melaksanakannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan didalam dokumen lingkungan hidup yang dimiliki, berupa Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH), misalnya permasalahan mengenai pengelolaan limbah industri yang masih belum terlaksana sesuai dengan dokumen lingkungan hidup yang PT. Bio Nusantara Teknologi miliki.⁶⁸

Pengelolaan limbah cair pada PT. Bio Nusantara Teknologi merupakan pengelolaan dengan menggunakan proses biologidengan menggunakan kolam yang terbuat dari tanah/lagon, kemudian dikolam akhir akan diisi biota hidup seperti ikan. Kolam pengelolaan limbah cair tersebut terdiri atas :

- Kolam I – II : merupakan kolam pendingin
- Kolam III – VI : Kolam primary anaerobik pond
- Kolam VII – IX : Kolam secondary anaerobic pond
- Kolam X : Kolam Aerobik

⁶⁸ Hasil wawancara di Kantor Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu, narasumber Bapak Syamsir pada tanggal 29 Agustus 2013 pukul 11.00 WIB

Apabila ikan yang dimasukkan kedalam kolam X (kolam aerobik) dapat bertahan hidup, maka hal tersebut sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan, sebaliknya apabila ikan tidak dapat bertahan hidup di kolam akhir maka, limbah cair pengelolaan tersebut tidak dapat dialirkan ke sungai dan mengandung racun.

Dampak-dampak yang ditimbulkan dari kegiatan perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit, PT. Bio Nusantara Teknologi mengupayakan memperkecil dampak-dampak yang terjadi dengan melakukan upaya pengelolaan lingkungan. Hal ini bertujuan untuk mengontrol pengeluaran air limbah atau effluent limbah cair pabrik kelapa sawit agar tidak mengakibatkan penurunan kualitas air di sungai Lemau, mencegah penumpukan limbah padat, menjaga kualitas udara agar memenuhi baku mutu yang ditetapkan, mengurangi potensi dampak pencemaran air dan lain sebagainya. Selain dari upaya pengelolaan lingkungan, PT. Bio Nusantara Teknologi juga melakukan pengelolaan secara rutin dan teratur disetiap pengelolaan dampak yang ditimbulkan. Pengelolaan penurunan kualitas air dilakukan secara rutin dan teratur setiap 3 bulan sekali, pengelolaan penurunan kualitas udara dilakukan secara rutin dan teratur dalam triwulan, dan pengelolaan lainnya yang dilakukan secara rutin dan teratur setiap saat selama pabrik beroperasi.

Namun, walaupun adanya upaya pengelolaan lingkungan dan telah melakukan pengelolaan secara teratur dan rutin, kegiatan perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit PT. Bio Nusantara Teknologi masih menghasilkan pencemaran terhadap lingkungan. Penurunan kualitas air yang mana air limbah dan air sungai Lemau sekitar wilayah PT. Bio Nusantara Teknologi melebihi baku mutu yang telah

ditetapkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor 92 Tahun 2001 tentang Penetapan Baku Mutu Lingkungan. Hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :⁶⁹

Tabel 1.5
Hasil Air Limbah

No.	Parameter Diperiksa	Satuan	Kadar maksimal ditetapkan	Hasil Outlet
KIMIA				
1.	Zat PadaTersuspensi (TSS)	mg/L	250	527
2.	pH		6,0 – 9,0	8,0
3.	BODS	mg/L	100	1000
4.	COD	mg/L	350	2600
5.	Nitrogen-Total	mg/L	40	15,30
6.	Minyak dan lemak	mg/L	25	24,18
7.	Timbal (Pb)	mg/L	-	0,003
8.	Tembaga (Cu)	mg/L	-	0,051
9.	Cadmium (Cd)	mg/L	-	0,003
10.	Seng (Zn)	mg/L	-	1,2

Tabel 1.6
Hasil Kualitas Air Sungai Lemau

No.	Parameter Diperiksa	Satuan	Kadar Maksimal Ditetapkan	*	**
b. FISIKA					
1.	DO	mg/L	6	0,14	0,15
2.	TDS	Skala/TCU	1000	39,3	66,5
3.	Suhu	°C	Suhu udara $\pm 3^{\circ}\text{C}$	24,5	24,9
c. KIMIA					
1.	BOD	mg/L	2	0,6	3,2
2.	COD	mg/L	10	4	16
3.	TSS	mg/L	50	15	44
4.	pH	-	6,5 – 9,0	5,5	5,5
5.	Posfat (PO_4)	mg/L	0,2	0,55	1,11
6.	Amoniak (NH_3)	mg/L	0,5	0,44	0,66
7.	Nitrat (NO_3)	mg/L	10	1,0	1,0
8.	Nitrit (NO_2)	mg/L	0,06	0,105	0,23

*Water Intake

⁶⁹ Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup PT. Bio Nusantara Teknologi

****sungai Lemau setelah dialiri effluent kolam pengelolaan**

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa, ada beberapa komponen yang melebihi baku mutu yang telah ditetapkan, seperti pada tabel air limbah dimana TSS kadar yang ditetapkan 250 sedangkan hasil outlet yang diperoleh melebihi dari 250 yaitu 527, BODS kadar maksimal yang ditetapkan 100 sedangkan hasil outlet yang diperoleh 1000, COD kadar maksimal yang ditetapkan 350 hasil outlet 2600. Adapun pada tabel hasil kualitas air sungai Lemau, terjadinya perubahan setelah sungai Lemau dialiri effluent kolam pengelolaan. Hampir seluruh komponen parameter yang diperiksa melebihi kadar maksimal yang ditetapkan, sehingga kualitas air sungai Lemau mengalami penurunan kualitas air dan terjadinya pencemaran.

Hasil yang berbeda untuk kualitas air sumur, bahwa keadaan air sumur yang telah diambil sampelnya masih tetap berada dibawah baku mutu yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor 92 tahun 2001. Kondisi tanah masih dapat menampung dan mendukung kegiatan aplikasi lahan dengan limbah cair hasil dari proses pengelolaan kelapa sawit.

Selain itu, pengelolaan limbah padat berupa kualitas udara juga mengalami penurunan. Sumber besar penyebab emisi udara diperoleh dari pembakaran serabut fibred an cangkang pada mesin boiler. Hal ini dikarenakan tidak terdapat incinerator untuk pembakaran tandan kosong, melainkan tandan kosong yang ada dipergunakan sebagai mulsa pada perkebunan kelapa sawit bertujuan untuk menambah unsur hara pada perkebunan kelapa sawit.

B. Dampak Sosial Adanya Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bio Nusantara Teknologi

Berkembangnya perusahaan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Bengkulu memberikan arti semakin banyak investor yang melakukan investasi di Provinsi Bengkulu. Salah satunya adalah PT. Bio Nusantara Teknologi yang merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang jenis investasinya merupakan penanaman modal dalam negeri (PMDN).⁷⁰ PT. Bio Nusantara Teknologi merupakan salah satu perusahaan swasta nasional yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit yang memberikan dampak terhadap lingkungan sekitarnya, seperti peningkatan kesempatan kerja dan berusaha. PT. Bio Nusantara Teknologi mampu merekrut tenaga kerja lokal yang tidak lain merupakan masyarakat sekitar PT. Bio Nusantara Teknologi untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit. Selain itu, timbulnya usaha-usaha sektor informal yang dikelola oleh masyarakat sekitar PT. Bio Nusantara Teknologi dan banyaknya petani budidaya kelapa sawit yang dapat menunjang pabrik kelapa sawit di PT. Bio Nusantara Teknologi.

Kegiatan usaha tersebut pada dasarnya merupakan upaya pemanfaatan peluang usaha yang tercipta sebagai akibat adanya mobilitas penduduk, baik yang terpengaruh secara langsung maupun sebagai akibat usaha yang tercipta oleh adanya pengaruh tidak langsung dari pembangunan perkebunan kelapa sawit dan pabrik

⁷⁰ Hasil wawancara di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Bengkulu (BKPMDD), narasumber Bapak Yahir pada tanggal 4 September 2013 pukul 10.00 WIB

kelapa sawit yang memungkinkan terbukanya peluang usaha lainnya. Peluang usaha-usaha tersebut akan menjadi sumber pendapatan yang memberikan tambahan penghasilan kepada masyarakat sekitar, sehingga terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat. Tidak semua kegiatan perkebunan memberikan atau menyebabkan timbulnya sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat, namun tergantung kepada jenis investasi perkebunan dan sektor ekonomi yang akan dilakukan. Investasi yang dilakukan memberikan pengaruh manfaat kegiatan perkebunan dan pabrik kelapa sawit terhadap masyarakat sekitarnya.⁷¹ Adanya PT. Bio Nusantara Teknologi yang merupakan perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit, perekonomian masyarakat sekitar mengalami peningkatan pendapatan.⁷² Hal ini dapat memperbaiki perekonomian masyarakat sekitar yang awalnya bekerja sebagai petani palawija dengan penghasilan minimum.

PT. Bio Nusantara Teknologi pun telah melakukan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) wujud dari dampak positif, salah satunya adalah PT. Bio Nusantara Teknologi memberikan bibit kelapa sawit kepada masyarakat kelompok tani. Hasil panen kelapa sawit tersebut akan dijual kepada PT. Bio Nusantara Teknologi itu sendiri dan masyarakat tidak perlu menjual keluar dari desa yang membutuhkan waktu dan biaya lebih banyak,

⁷¹ Jurnal Dampak Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap *Multiplier Effect* Ekonomi Pedesaan oleh Almasdi Syahza, Lembaga Penelitian Universitas Riau, Pekanbaru. Tahun 2004.

⁷² Hasil wawancara terhadap masyarakat sekitar PT. Bio Nusantara Teknologi. Narasumber Bapak Bambang pada tanggal 13 September 2013 pukul 15.00 WIB

sehingga adanya hubungan mutualisme antara PT. Bio Nusantara Teknologi dengan masyarakat sekitar.

Keberadaan PT. Bio Nusantara Teknologi ini juga menimbulkan dampak sosial yang bersifat negatif. Hal ini dapat dilihat dari konflik lahan di wilayah sungai Limau (wilayah PT. Bio Nusantara Teknologi sekarang) akibat Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan PT. Bio Nusantara Teknologi. Konflik ini muncul di awal berdirinya PT. Bio Nusantara Teknologi yang merebut secara paksa lahan masyarakat sekitar. Tidak hanya itu, ganti rugi yang akan dilakukan oleh PT. Bio Nusantara Teknologi kepada masyarakat yang tanahnya diambil tidak sesuai dengan yang dijanjikan.⁷³ Masyarakat yang tidak setuju dengan adanya PT. Bio Nusantara Teknologi melakukan aksi protes dan demo. Hingga sekarang konflik antara masyarakat dengan PT. Bio Nusantara Teknologi masih tetap terjadi, sebagai contoh, aksi demo yang dilakukan oleh masyarakat dengan membakar rumah terjadi pada Afdeling 4 yang disebabkan cemburu sosial.⁷⁴

Selain itu, dampak-dampak yang ditimbulkan dari kegiatan perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit berupa penurunan kualitas air terutama kualitas sungai Limau, penurunan kualitas udara akibat asap hasil pabrik pengolahan kelapa sawit dan lain sebagainya yang menyebabkan masyarakat sekitar mengalami ketidaknyamanan. Masyarakat sekitar merasa terganggu dengan pelaksanaan kegiatan operasional pabrik kelapa sawit. Bukan hanya ketidaknyamanan saja yang dirasakan

⁷³ Kronologis konflik lahan di wilayah sungai Limau akibat Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan PT. Bio Nusantara Teknologi

⁷⁴ Hasil wawancara dengan masyarakat.

oleh masyarakat sekitar, namun penurunan kesehatan masyarakat dan keselamatan kerja karyawan pabrik kelapa sawit juga mengalami penurunan. Hal ini bersumber pada kegiatan operasional pabrik kelapa sawit yang berpotensi menghasilkan cemaran atau polutan yang berpotensi menurunkan kesehatan sehingga menyebabkan pekerja PT. Bio Nusantara Teknologi mengidap penyakit.

Dampak sosial lainnya yang timbul ialah adanya kesenjangan sosial dimana tenaga-tenaga kerja pada PT. Bio Nusantara Teknologi sebagian besar berasal dari luar wilayah sekitarnya, terutama pekerja menengah dan tingkatan pimpinan yang banyak didatangkan dari luar khususnya dari pulau jawa. Selain itu, pekerja yang didatangkan dari pulau jawa ini memperoleh fasilitas yang lebih dibandingkan dengan masyarakat sekitar. Sebagai contoh, seorang pekerja supir Bus PT. Bio Nusantara Teknologi yang datang dari pulau Jawa diberikan fasilitas rumah, pembayaran listrik ditanggung oleh perusahaan, dan jalan disekitar rumahnya lumayan layak dibandingkan dengan jalan di masyarakat yang merupakan penduduk asli.⁷⁵

Dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dengan adanya PT. Bio Nusantara Teknologi ini membuat masyarakat sekitar berpresepsi negatif, sehingga masyarakat banyak yang mengeluh dan melakukan protes yang diwujudkan dalam bentuk aksi protes, unjuk rasa dan tindakan yang mengganggu pelaksanaan kegiatan operasional pabrik kelapa sawit.

⁷⁵ Hasil observasi dan wawancara terhadap masyarakat.